

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 10, 12 DAN 28 NOVEMBER 2014

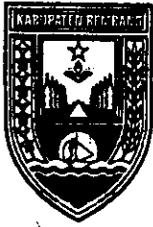


**TENTANG
RAPERDA
APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (I)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

Hari : SENIN
Tanggal : 10 November 2014
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2015;
3. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. MAJID KAMIL. MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 43 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: - orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: - orang
5. Fraksi Gerindra	: - orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 2 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

- Yang terhormat Plt. BupatiRembang
- Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan
semua undangan lainnya yang tidak dapat saya
sebutkan satu persatu.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Senin tanggal 10 November 2014 kita masih diberi kesempatan dapat melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dalam keadaan sehat wal afiat. Tak lupa Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat dan pengikutnya hingga akhir hayat.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 sangat erat kaitannya dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PPAS) Tahun 2015, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Hal ini tercermin dalam rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan, baik menyangkut kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang tertuang dalam Rencana Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27 Oktober 2014, bahwa Rapat Paripurna ini merupakan Rapat Paripurna pertama (I) dari 3 (tiga) Rapat Paripurna yang diagendakan dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015. Mudah-mudahan dalam pembahasan Raperda APBD ini hingga selesai nanti, dapat berjalan lancar serta selalu memperhatikan kondisi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang pada khususnya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Amanat Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa *“Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD”*.

Dan berdasarkan catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 43 orang. Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap *“Bismillahirrohmanirrohim”* tepat pukul 11. 10 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Sebelum berlangsung lebih lanjut, untuk selengkapanya saya sampaikan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
3. Penutup.

Selanjutnya marilah kita masuki acara pokok dalam rapat paripurna hari ini yaitu " *Penjelasan Bupati tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015* ".

Untuk itu kepada Saudara Plt. Bupati Rembang, dipersilahkan.

**=== PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA APBD
KABUPATEN REMBANGT.A 2015 ===**

(H. Abdul Hafidz)

➤ *(Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 terlampir)*

Terima kasih saya sampaikan kepada Sdr. Plt. Bupati Rembang yang telah menyampaikan Penjelasan Bupati tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Demikian tadi kita ikuti bersama Penjelasan Bupati tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Rapat Fraksi besok pagi tanggal 11 November 2014 untuk menyusun Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 sebagai bahan Pelaksanaan Rapat Paripurna Kedua (II) tanggal 12 November 2014.

Bapak Ibu Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati.

Dalam rapat koordinasi pada tanggal 5 November 2014 antara Plt. Bupati dan Pimpinan DPRD yang masing-masing didampingi oleh Sekda dan para Ketua Fraksi, telah diusulkan perubahan tahapan pembahasan

Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, terutama yang menyangkut Rapat antara Badan Anggaran dan TAPD tanggal 13 November 2014 dalam rangka penjelasan lanjutan atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2015.

Usulan tersebut didasarkan bahwa rapat penjelasan lanjutan atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 akan lebih bermanfaat apabila disampaikan sebelum Rapat Fraksi dalam rangka menyusun Pemandangan Umum (sebagaimana foto copy dihadapan Saudara-Saudara).

Dengan demikian pandangan Fraksi akan lebih tajam dan menyentuh persoalan karena telah mendapat penjelasan dari TAPD.

Namun demikian semuanya terserah kepada anggota DPRD sekalian. Oleh karena itu saya tawarkan pada Saudara-saudara

“ Apakah disetujui Rapat Banggar bersama TAPD dalam rangka Penjelasan Lanjutan Atas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan setelah Rapat Paripurna ini ?”

===== S E T U J U U U =====

(Ketuk Palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Acara dalam rapat paripurna ini telah kita lalui, namun sebelum saya akhiri, sehubungan hari ini adalah bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, maka pada kesempatan ini saya mengajak dan menghimbau kepada semua yang hadir disini :

“ Marilah momentum peringatan Hari Pahlawan ke 69 dengan tema **Pahlawanku Idolaku** di tahun 2014 ini, kita tingkatkan kerjakeras dan

semangat kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ada dengan penuh rasa tanggungjawab dan pengabdian, serta semakin menginspirasi kita untuk tidak melupakan sampai kapanpun jasa-jasa dan nilai- nilai yang telah dibangun oleh pendahulu dan pendiri bangsa ini “

Akhirnya terima kasih atas perhatian dan kehadirannya serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat pada hari ini. Dengan mengucap “*Alhamdulillahillobbil ‘alamiin* “ tepat pukul 11.30 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

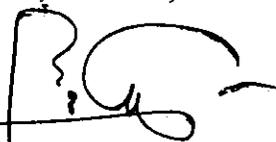
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A,



H. MAJID KAMIL, MZ

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

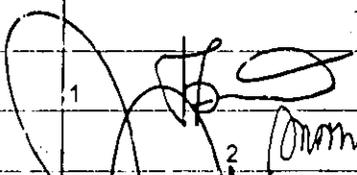
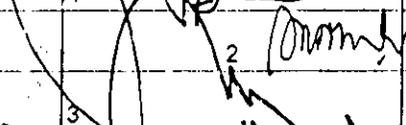
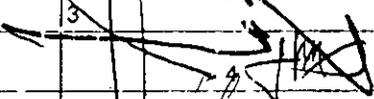
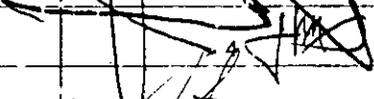
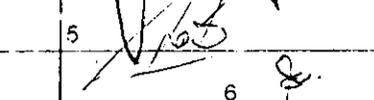
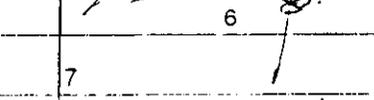
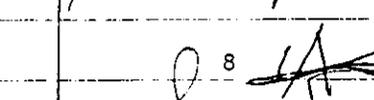
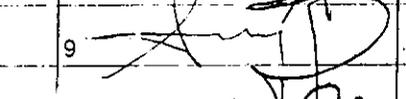
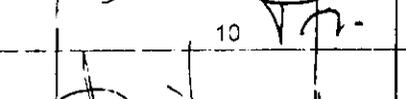
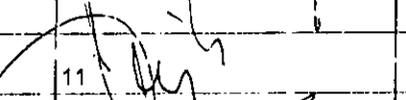
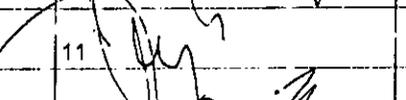
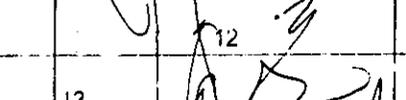
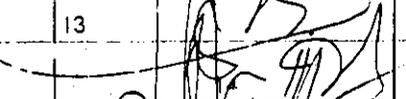
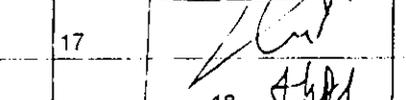
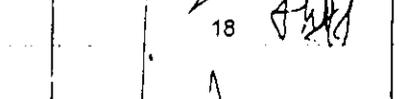
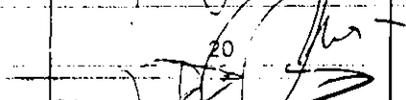
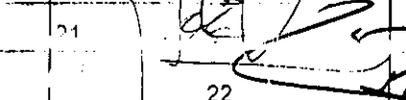
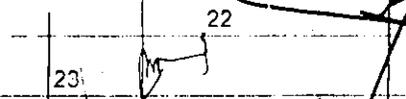
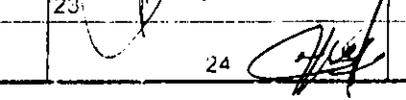
**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda
APBD Tahun Anggaran 2015;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA APBD KAB. REMBANG TA 2015

HARI/TANGGAL : SENIN, 10 NOPEMBER 2014
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL, MZ.	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, SE	Anggota		
18	MUGIYARTO, ST	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUEF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, BA	Anggota		
23	WASIMAN	Anggota		
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd	Anggota		

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	RIDWAN, SH. ME	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DJROR, Spdi	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSI	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.K, Spd	Anggota	45	
	SEKRETARIAT DPRD			
46	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris DPRD	46	
47	Drs. LATOIFUL MINAN	Kabbag. Keuangan	47	
48	GATOT DARYANTO, SH	Kabbag. Umum	48	
49	RATRIADI SAPTEKO, SH	Kasubbag. Rapat & Risa'lah	49	
50	JOKO PRIYONO, SE	Kasubbag. Perbendaharaan	50	
51	BAMBANG B.S. SH	Kasubbag. Humas & Protokol	51	
52			52	
53			53	
54			54	
55			55	

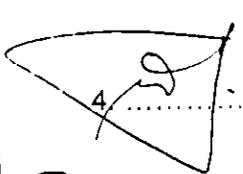
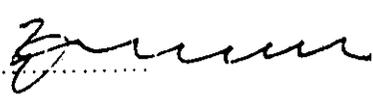
Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA APBD KAB. REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015

HARI/TANGGAL . SENIN , 10 NOPEMBER 2014
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Plt. Bupati Rembang	1. 
2	Kejaksaan Negeri Rembang	2.
3	Pengadilan Negeri Rembang	3.
4	<i>Letk Inf. Wawan I, Spd.</i>	Dandim 0720 Rembang	4. 
5	<i>Kp. Jayus Gauda</i>	Kepolisian Resort Rembang	5. 
6	Pengadilan Agama Kab. Rembang	6.
7	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	7. 


 SEKRETARIAT DPRD KAB. REMBANG
Dr. Achmad Mualif
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA APBD KAB. REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015

HARI/TANGGAL : SENIN, 10 NOPEMBER 2014
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	M. Mulyono	1
2	CAMAT KALIORI	Chris Prasetyana	2
3	CAMAT SUMBER	HERYOWO	3
4	CAMAT SULANG	REDAH G	4
5	CAMAT BULU	SUSWANTORO	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. Wiyoto	6
7	CAMAT GUNEM	REDAH G	7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM	RUKUN P	9
10	CAMAT PANCUR	Suharto	10
11	CAMAT SEDAN	M. Nasirudin	11
12	CAMAT SLUKE	Ban Gang S.	12
13	CAMAT KRAGAN	MASHERI	13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kuswanto	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



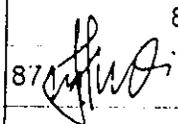
Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA APBD KAB. REMBANG
BESERTA NOTA KEUANGAN

HARI/TANGGAL : SENIN , 10 NOPEMBER 2014
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Muz Effendi	STAB	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	A. JAWAHIR	AS. III	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Akh. Saude	Kabeg	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Johani N.	Kabeg	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	ABDULHAKIM	BAG. KESEJAHTERAAN	13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	M. H. H. J. S.	BK	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	End. Sulaiman	ORPEK	15
16	BAG. UMUM			16
17	DPPKAD	MUSMUN	DPPKAD	17
18	INSPEKTORAT	FAHRUDIN	INSPEKTORAT	18
19	BAPPEDA	Hari S		19
20	BPMPKB	AGATINI	SEKRET	20
21	BKD	Suparman	BKPP	21
22	BKP & P4K	PSIKO S	UMPEG	22
23	B P B D	Sulaiman	Kabeg	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Mayowid	PPUK	24
25	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utomo	Sebet	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Mara	Kabid	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Sarjono	Kabid	27
28	DINTANHUT	Suramin		28
29	DINLUTKAN	Suparman	Kabid	29

NO	BADAN/BAG/DINAS/KAN/TOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINHUBKOMINFO	JOESTI ANNARANI	Kabid.	30
31	DINAS DUKCAPIL	NUGENTO	sektor	31
32	DINSOSNAKERTRANS	WALUYO	KADIS	32
33	DINBUDPARPORA	SURYANTO	sektor	33
34	DINAS ENERGI & SDM			34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Purnadi	ka	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	ka	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Esi Winarnas	ka	37
38	KANTOR PPT	Ety Purdyah	Ka. TU	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Y. Gus I.	Kepu TV	39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH	Sangga Sihombing	ka. unit.	43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	M. MAHMUDI	Kantor Binaas ISLAM	50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BFS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR KPU KAB. REMBANG			57
58	KANTOR POS DAN GIRO			58
59	TELKOM REMBANG			59
60	PLN CAB. REMBANG			60
61	BAWASLU KAB. REMBANG			61
62	B P N KAB. REMBANG			62

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	KANTOR PAJAK			63
64	UP3AD (ASET DAERAH)			64
65	KANTOR PELABUHAN			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN FRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE YPP! REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	MASUDI	Reporter	87 
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95		*g u w	TA FICS	95 

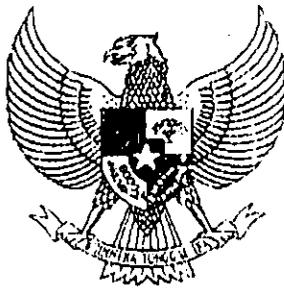
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	LSM SEMUT ABANG	GUS NO	Wiro	96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125
126				126
127				127
128				128
129				129

NO	BADAN/SAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
130				130
131				131
132				132
133				133
134				134
135				135
136				136
137				137
138				138
139				139
140				140
141				141
142				142
143				143
144				144
145				145
146				146
147				147
148				148
149				149
150				150



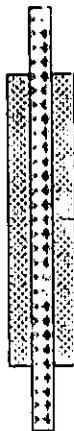
Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 10620304 198803 1 011



P E N G A N T A R
N O T A K E U A N G A N

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN
2015



BUPATI REMBANG

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita masih diberikan nikmat sehat, dan dapat bersama-sama hadir dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan selamat kepada seluruh anggota Dewan Yang Terhormat periode tahun 2014-2019 yang beberapa bulan lalu baru saja mengucapkan sumpah janji untuk mengemban amanat rakyat. Apresiasi kami khususnya kerjasama yang telah terjalin selama ini antara Eksekutif dengan Legislatif dan mudah-mudahan kedepan dapat lebih bersinergi dengan baik lagi, sehingga berbagai agenda dan tahapan pembangunan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015 ini sebagai implementasi dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), memiliki arti penting bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang. Hal ini terkait dengan adanya sejumlah agenda penting yang akan kita lakukan pada Tahun 2015.

Sebagai instrumen kebijakan daerah RAPBD merupakan posisi sentral dalam rangka pengembangan kemampuan dan efektivitas pemerintahan, yaitu dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi, sehingga proses penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran difokuskan sebagai upaya guna mendukung program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah.

Kebijakan pembangunan dalam tahun 2015, telah dijabarkan secara rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015, yang menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2015 ini, guna mencapai sasaran pelaksanaan TAHAP AKHIR Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 dimana diperlukan akselerasi terhadap capaian-capaian target yang masih belum tercapai. Untuk itulah diperlukan upaya kerja keras dan kerja cerdas dari semua pemangku kepentingan untuk memacu pembangunan di Kabupaten Rembang.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sebagai komitmen dan ketaatan kita terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2015 ini kami telah berupaya untuk memproses perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 yaitu :

1. Dalam rangka peningkatan BIDANG PENDIDIKAN, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah.

Dalam RAPBD 2015 : Belanja Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan) sebesar Rp.556,5 Milyar, atau 40,18% dari Total Belanja Daerah.

2. Dalam rangka peningkatan BIDANG KESEHATAN, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji.

Dalam RAPBD 2015 : Belanja Bidang Kesehatan tidak termasuk belanja gaji PNSD (Dinas Kesehatan dan RSUD DR. Soetrasno) sebesar 117,9 Milyar, atau 23,75 % dari Total Belanja diluar Belanja Gaji.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial : sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, telah dialokasikan sesuai dengan perencanaan dan usulan, yang berorientasi pada upaya penanggulangan masalah sosial serta untuk menunjang urusan pemerintah daerah.

4. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dalam RAPBD 2015 : Pemerintah Kabupaten Rembang mendapat alokasi berupa Dana Transfer dari APBN sebesar Rp.39,1 Milyar.

b. Pemerintah Kabupaten menganggarkan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam RAPBD 2015 : Pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan sebesar Rp. 6,16 Milyar.

c. Pemerintah Kabupaten menganggarkan ALOKASI DANA DESA (ADD) dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan dalam APBD TA 2015 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam RAPBD 2015 : Pemerintah Kabupaten Rembang telah menganggarkan sebesar Rp. 75,08 Milyar.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Penyusunan RAPBD 2015 ini juga mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah.

Tujuannya antara lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem penganggaran, akuntansi dan pelaporan dalam sektor publik, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan akuntabilitas serta menyediakan informasi yang lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Secara luas proses penganggaran lebih transparan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam RAPBD TA 2015 pendapatan Daerah direncanakan mencapai Rp.1,28 Triliun. Jumlah ini turun 3,36 persen dari target pendapatan daerah pada APBD Tahun 2014 sebesar Rp.1.33 Triliun. Sementara itu, anggaran belanja daerah direncanakan mencapai Rp.1.38 Triliun, turun 7,06 persen dari pagu belanja daerah pada APBD tahun 2014 yang sebesar Rp.1,49 Triliun.

Dari anggaran pendapatan daerah Rp.1,28 Triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp.178,3 Milyar naik 2,99 persen dari target APBD tahun 2014 sebesar Rp.173,1 Milyar. Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.723,09 Milyar mengalami kenaikan sebesar 3,18 persen dibandingkan besaran DAU pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.700,7 Milyar

Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.68,6 Milyar mengalami kenaikan sebesar 11,39 persen dibandingkan DAK pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 61,6 Milyar

Sementara itu untuk Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi beserta belanja kegiatannya belum dicantumkan, karena sampai saat ini belum ada penetapan dari Pemerintah Propinsi.

Dari sisi belanja, dalam RAPBD tahun 2015 ini pemerintah daerah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas belanja daerah secara menyeluruh guna mencapai sasaran pelaksanaan tahap akhir RPJMD tahun 2010-2015. Total belanja daerah dalam RAPBD TA 2015 sebesar Rp.1,38 Triliun.

Untuk Pembiayaan Daerah :

Pada pengeluaran pembiayaan RAPBD TA 2015 penyertaan modal pada PT. Bank Jateng sebesar Rp.2,254 Milyar.

Berikut kami sampaikan ringkasan Rancangan PERDA tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 :

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN DAERAH	1.289.108.300.640
Pendapatan Asli Daerah	178.334.966.000
Pendapatan Pajak Daerah	36.203.000.000
Hasil Retribusi Daerah	25.369.244.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.404.000.000
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.358.722.000
Dana Perimbangan	819.451.224.000
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.733.137.000
Dana Alokasi Umum	723.091.447.000
Dana Alokasi Khusus	68.626.640.000
Lain - lain Rendapatan Daerah yang Sah	291.322.110.640
Hibah	1.492.290.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	61.172.513.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	228.657.307.640
BELANJA	1.384.781.527.640
Belanja Tidak Langsung	888.012.268.361
Belanja Pegawai	720.090.982.050
Belanja Bunga	37.000.000
Belanja Hibah	37.178.760.200
Belanja Bantuan Sosial	5.333.200.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	124.372.326.111
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
Belanja Langsung	496.769.259.279
Belanja Pegawai	107.762.054.600
Belanja Barang dan Jasa	242.888.100.200
Belanja Modal	146.119.104.479
SURPLUS / (DEFISIT)	(95.673.227.000)
PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	97.982.227.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	97.982.227.000
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.309.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.254.000.000
Pembayaran Pokok Utang	55.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	95.673.227.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-

Hadirin Sidang Dewan yang Saya Hormati,

Demikian telah kami sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, mengingat Rancangan Perda tentang APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang harus kita pertanggungjawabkan, maka Saya berharap agar dibahas secara mendalam, obyektif dan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 ini dapat ditetapkan sesuai tahapan penganggaran dan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 10 Nopember 2014.

PI BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI



H. ABDUL HAFIDZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (II)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

Hari : RABU

Tanggal : 12 November 2014

Waktu : 09.30 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015;
3. Skors;
4. Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi;
5. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. MAJID KAMIL. MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 6 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 5 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 4 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 6 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 6 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 6 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 5 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 4 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 41 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : - orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 2 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : - orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 2 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : - orang |

6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	: 4 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Plt. Bupati Rembang

Yang saya hormati Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan
semua undangan lainnya.

Sebelum kita melangkah pada acara pokok rapat hari ini, marilah kita terlebih dahulu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan anugerah-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Kedua (II) DPRD Kabupaten Rembang membahas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dengan agenda pokok Penyampaian Pemandangan

Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi .

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 27-Oktober 2014, Rapat Paripurna hari ini merupakan Rapat Paripurna Kedua (II) dalam membahas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dengan agenda pokok Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dan dilanjutkan dengan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Sebagaimana Rapat Paripurna pertama (I) pada tanggal 10 November 2014 kemarin, sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 pada Pasal 80 ayat (1) huruf b bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Sesuai dengan catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 41 orang, dengan demikian maka Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap “ *Bismillahirrohmanirrohim* ” tepat pukul 11. 15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum berlangsung lebih lanjut, akan saya bacakan susunan acara rapat paripurna hari ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.
3. Skors.
4. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.
5. Penutup.

Selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015.

Untuk itu kepada Saudara-saudara anggota Fraksi DPRD yang akan menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, saya persilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Muhammad Anshori
2. Fraksi Demokrat : Edi Kartono, S.Pd. MH
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Ali Ircham, ST
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Puji Santoso, SP. MH
6. Fraksi Karya Sejahtera : H. Joko Suprihadi, SH
7. Fraksi Harapan : Paramita Prapanca ANR, S.Pd

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sampai dengan Fraksi Harapan, secara berurutan saya persilahkan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya :

===== **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI** =====

➤ *(Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD terlampir)*

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya dalam menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum dilanjutkan dengan acara yang ketiga yaitu jawaban Bupati atas Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, maka terlebih dahulu kita berikan waktu kepada Saudara Plt. Bupati Rembang untuk mempersiapkannya. Untuk itu Rapat Paripurna saya skors selama 60 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

===== **SKORSING** =====

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Sehubungan waktu yang telah diberikan kepada Saudara Plt. Bupati dalam menyusun Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 telah selesai, maka skors saya cabut dan tepat pukul 14. 45 WIB Rapat Paripurna saya buka kembali.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara yang keempat, yaitu Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015. Kepada Saudara Plt. Bupati dipersilahkan.

**==JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2015 ==**

(Sdr H. Abdul Hafidz)

➤ (Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terlampir)

Terima kasih kepada Saudara Plt. Bupati, yang telah menyampaikan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

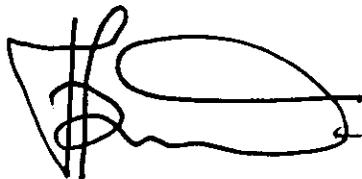
Acara rapat paripurna hari ini telah kita lalui dengan seksama dan selesai sesuai dengan yang diagendakan. Terima kasih atas perhatiannya serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat pada hari ini. Akhirnya dengan mengucap "Alhamdulillahirobbil 'alamin" tepat pukul 15. 30 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

K E T U A



H. MAJID KAMIL, MZ

SEKRETARIS



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap
Raperda APBD Tahun Anggaran 2015;
- LAMPIRAN III : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum
Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun
Anggaran 2015.

DAFTAR HADIR
RAPAT PAR/PURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL : RABU, 12 NOPEMBER 2014

PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGHARTO	Anggota	2	
3	P.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOLAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13	
14	Hj. HEMAH PURNAMA WATI	Anggota	14	
15	Ie. H. SUNARTO	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUEF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOLAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd	Anggota	24	

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spdi	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSI	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.M.R, SPd	Anggota	45	
	SEKRETARIAT DPRD			
46	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris DPRD	46	
47	Drs. LATOEFUL MINAN	Kabag. Keuangan	47	
48	GATOT DARYANTO, SE	Kabag. Umum	48	
49	R. VTRIADI SAPTEKO, SH	Kasubbag. Rapat & Risalah	49	
50	JOKO PRYONO, SE	Kasubbag. Perbendaharaan	50	
51	BAMBANG B.S, SH	Kasubbag. Humas & Protokol	51	
52			52	
53			53	
54			54	
55			55	

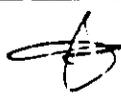
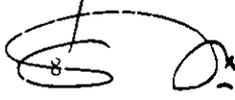
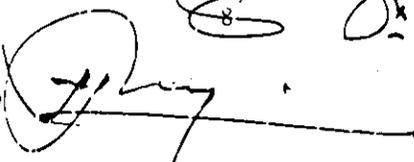
Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2015
KABUPATEN REMBANG**

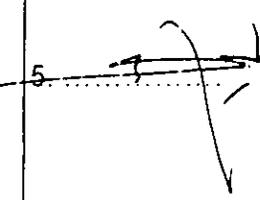
HARI/TANGGAL : RABU, 12 NOPEMBER 2014
PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Salim	1 
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOLIH	2 
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SELANG	4
5	CAMAT BULU	SUSWANTEN	5 
6	CAMAT PAMOTAN	M. Wafar	6 
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	Kumadi	8 
9	CAMAT LASEM	Keremad	9 
10	CAMAT PANCUR	10
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	Subagyo	12 
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	Baschmad S	14 

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DPRD KAB. REMBANG
SETWAN
Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198303 1 011

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2015
KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL : RABU, 12 NOPEMBER 2014
PUKUL : 09.30 WIB

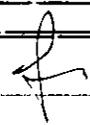
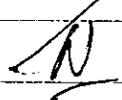
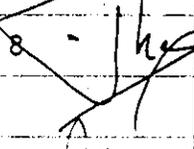
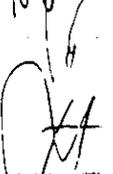
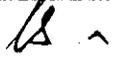
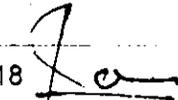
NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Plt. Bupati Rembang	1. 
2	Kejaksaan Negeri Rembang	2.
3	Pengadilan Negeri Rembang	3.
4	Kpt. A. Rohman	Dandim 0720 Rembang	4. 
5	Kp. X. S. Setia	Kepolisian Resort Rembang	5. 
6	Pengadilan Agama Kab. Rembang	6.
7	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	7. 

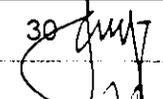
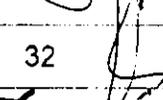
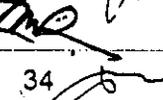
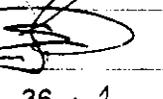
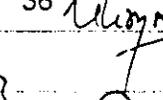
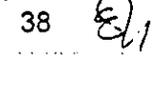
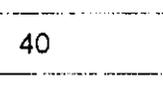
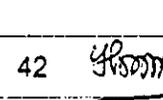
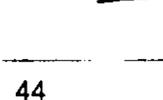
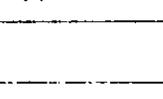
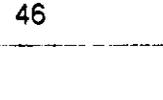
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

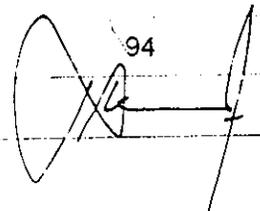
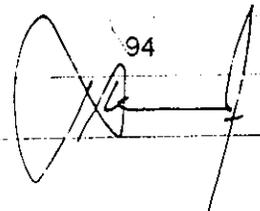
SETWAN
Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

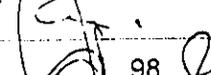
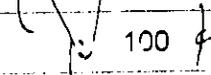
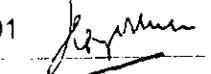
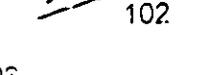
**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAI'AT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG**

HARI/TANGGAL : RABU, 12 NOPEMBER 2014
PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Noor Efendi	STAB	1 
2	STAF AHLI BUPATI	Narsono	W	2 
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	A. JAWADI	AS. II	7 
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Achsanuddin	Bag. Tata	8 
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	YOHANA ISW	Bag. Humas	10 
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gantarto	As. Pmb	11 
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13 
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Mirza Nur	As. KE	14 
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Erd Juliarwati	ORPEG	15 
16	BAG. UMLM	Suwend	Ka	16 
17	DPPKAD	MUSAN	Ka DPPKAD	17 
18	INSPEKTORAT	FARU DIN	INSPEKTORAT	18 
19	BAPPEDA	Hari S	Ka	19 
20	BPMPKB	HGATIHI	Bekret	20 
21	BKD	SUPARMAN		21 
22	BKP & P4K			22
23	B P B D	SUCIARNO	Ka	23 
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	HARJOUS	DPUK	24 
25	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utu	Sevran	25 
26	DINAS PENDIDIKAN	Mardi	Kaid	26 
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Sugianto	Kabod	27 
28	DINTANHUT	Surasmin	Ka Bi	28 
29	DINLUTKAN	SUPARMAN	Ka BKP	29

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINHUBKOMINFO	Suy OMO	Ka. Dinas	30 
31	DINAS DUKCAPIL	M Daemir	Ka. DUK	31 
32	DINSOSNAKERTRANS	PRATIYO R	Plt. Serpin	32 
33	DINBUDPARPORA	SURYANTO	seka	33 
34	DINAS ENERGI & SDM.	Maryosa	sekretaris	34 
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	P. H. H. H. H.	seka	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	ka	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Egi Winarno	ka	37 
38	KANTOR PFT	Eky Purdiyanto	ka. TI	38 
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	AGUS SETHOKO	direktur	39 
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M	EUSWAKHID H	PIR	42 
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASSEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG *			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPC PAN			78
79	DPC PARTAI PANURAH			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	MASUDI	Reporter	87 
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSFRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94 
95	POLRES REMBANG	CAHOTO W. SH. SIKMH	KABANG OPS	95 

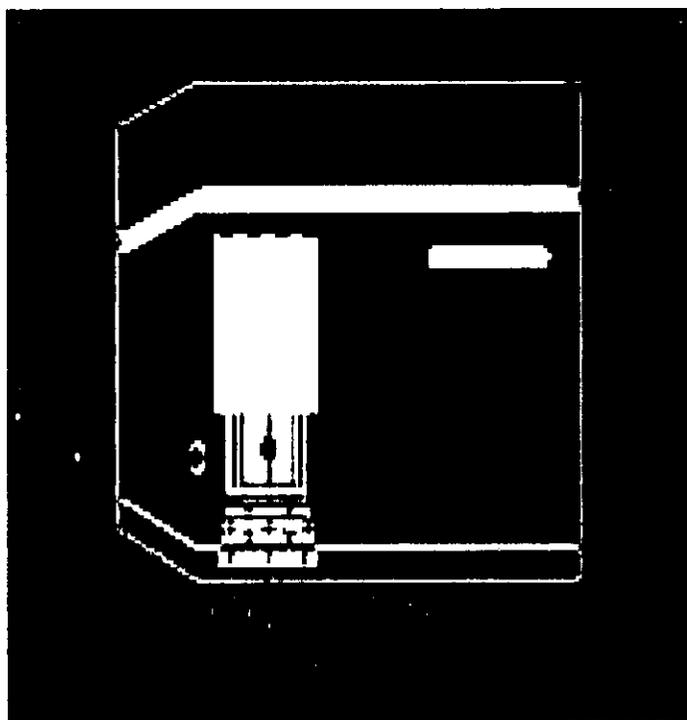
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96		Andi W	TA FKS	 96
97	Wakil Ketua DPRD	Daryono		 97
98		Mulyanti		 98
99	LSM SETIA ARZAK	SUSNO		 99
100	SETIA ARZAK	Hani		 100
101		Sugiono		 101
102				102
103				103
104				104
105				105


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620704 198303 1 011

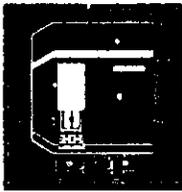
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2015



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari : Selasa Tanggal : 12 Nopember 2014
Dibacakan oleh : MOHAMMAD ANSHORI



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Jl.P. Diponegoro no.88 Rembang Kode Pos 59211

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2015**

**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Hari : Selasa Tanggal : 12 Nopember Tahun 2014

Dibacakan Oleh : Mohammad Anshori

Assalamualaikum Warohmatulloh Wabarokatuh.

Alhamdulillah robbil 'Alamin wabihi nasta'in 'ala umuriddunya waddin, wassolatu wassalamu ala asyrofil ambiya i wal mursalin sayyidina wamaulana muhammadin wa'ala alihi waashabihi ajma'in. Amma ba'du :

Yang kami hormati :

- Saudara PLT Bupati Rembang
- Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Saudara Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Saudara Ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang;
- Saudara Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Rembang;
- Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Camat se- kabupaten Rembang;

- Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
- Saudara-saudara dari kalangan media serta semua yang hadir pada sidang paripurna hari ini, yang berbahagia.

Pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah kami mengajak kepada para hadirin sidang Dewan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat, taufiq dan hidayah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bersama sama dapat hadir disini guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiyat.

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu salah satu nabi yang telah menuntun kepada kita semua dari jurang kesesatan menuju jalan yang terang benderang yakni Agama Islam dan semoga kita mendapat Rahmat serta syafaatnya besok pada hari qiyamat. Amin... Amin Ya Robbal Alamin...

Hadirin sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum kami mencermati penyampaian RAPBD 2015, kami meyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemkab Rembang diantaranya, pencapaian target pelaksanaan APBD 2014 yang sampai saat telah mencapai sekitar 90 %, sehingga sampai akhir tahun diprediksi akan bisa selesai 100 %. Hal ini karena kineja Pemkab dan DPRD yang maksimal. Selain itu, F-PPP juga mengucapkan terima kasih kepada Plt Bupati dan TAPD yang telah menyampaikan RAPBD 2015 sesuai target, sehingga penetapan RAPBD 2015 bisa tepat waktu. Mencermati postur RAPBD 2015 oleh saudara Plt Bupati, kami juga mengapresiasi adanya peningkatan PAD yang signifikan dan juga tidak mengalami defisit anggaran.

Hadidrin, sidang dewan yang terhormat,

Setelah mendengarkan Penjelasan PLT Bupati tentang rancangan RAPBD Rembang tahun anggaran 2015 dalam rapat paripurna Pada Hari senin Tanggal 10 Nopember 2014 FPPP mengapresiasi untuk melakukan perubahan sebagaimana kesepakatan bersama melalui kebijakan Umum anggaran (KUA) dan prioritas Plafon Anggaran Semetara (PPAS) RAPBD Tahun anggaran 2015.

Hadidrin, sidang dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini perkenankan kami sampaikan beberapa saran dan masukan :

1. BIDANG PEMERINTAHAN

Bahwa dengan alokasi dana desa (ADD) dan DAK tahun 2015 yang mengalami kenaikan cukup besar, maka harus diikuti dengan kualitas manajemen, monitoring, pengawasan dan evaluasi keuangan desa secara baik. Oleh karena itu para perangkat desa perlu dibekali dengan peningkatan kemampuan manajemen keuangan dengan cara dilakukan pelatihan administrasi keuangan. Sehingga jangan sampai terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan desa.

2. BIDANG PENDIDIKAN

Dibidang pendidikan, kami F-PPP mengapresiasi adanya pendidikan gratis mulai tingkat SD, SMP, MI, MTs negeri maupun swasta, bahkan sebagian dari SLTA yang ada di Kabupaten Rembang. Harapan kami kedepan pendidikan gratis tingkat SLTA secara menyeluruh dapat di wujudkan. Selain itu, kemajuan dibidang pendidikan juga di tentukan oleh kualitas SDM dan sarana prasarana yang layak. Kami F-PPP meminta agar pelaksanaan perbaikan sekolah dilaksanakan sesuai peruntukan dan sisi urgensinya. Selain itu perlu pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur sekolah. Karena dilapangan masih kita temui proyek perbaikan sekolah kualitasnya kurang baik, ini karena pengawasan kurang maksimal. Dengan besarnya anggaran dibidang pendidikan dari pusat dan daerah maka pembangunan dibidang pendidikan diharapkan bisa lebih maksimal.

Termasuk pula dinas pendidikan harus mempunyai program evaluasi berkala terhadap kinerja guru yang telah bersertifikasi, sehingga ini bisa mendorong peningkatan kualitas dan profesionalitas guru. Ini sekaligus untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi terhadap berlakunya kurikulum 2013. FPPP juga meminta kepada Dinas pendidikan untuk lebih memperhatikan pendidikan nonformal termasuk Madin dan pesantren, harus ada sinergi antara program dan kegiatan Dinas pendidikan dengan kegiatan Ponpes dan Madin sehingga diharapkan saling mendukung dan memperkuat.

3. BIDANG KESEHATAN

Pelayanan pasien miskin perlu mendapatkan prioritas terutama dalam memperoleh kemudahan - kemudahan administrasi pelayanan ketika di RSUD Dr. Soetrasno Rembang. F-PPP melihat koordinasi pihak yang terkait terhadap

pelayanan kesehatan untuk pasien kurang mampu baik dari sisi validasi data dan pelayanan kurang memenuhi harapan. Kami berharap peran puskesmas kedepan bisa menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh Karena itu Pemkab harus memperbanyak Puskesmas rawat inap yang lebih representatif dan nyaman, sehingga pengobatan penyakit yang bisa di atasi di Puskesmas, tidak perlu dirujuk ke RSUD. Kami meminta perlu ada sistem yang terintegrasi antara puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) dan RSUD Dr. Soetrasno Rembang.

4. BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PARIWISATA.

Dibidang Pertanian F-PPP meminta dinas Pertanian dan Kehutanan agar terus berkonsentrasi memajukan dan meningkatkan kualitas para petani kita yang antara lain dengan merubah sitem pertanian tradisional ke modern. Dengan lebih serius mendorong petani menggunakan pupuk organik. Kemudian juga mengawal keterpenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Sebagai daerah yang tidak dilalui sungai - sungai besar, F-PPP mendorong Pemkab Rembang dan pemerintah di atasnya untuk menambah jumlah embung baik dalam skala kecil, sedang maupun besar. Karena manfaat embung sangat besar dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air baik untuk pengairan teknis/pertanian maupun air baku (air bersih).

Untuk bidang kelautan, FPPP meminta agar dinas Perikanan Dan Kelautan memprioritaskan program-program yang berpihak kepada nelayan. Selain itu program bantuan pemerintah (baik itu bansos maupun hibah) kepada nelayan harus tepat sasaran. Setelah itu harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang tepat sehingga bantuan tidak melenceng.

Kemudian dibidang pertambangan FPPP meminta kepada pelaku usaha tambang dan dinas terkait untuk tetap memperhatikan dampak lingkungan, dengan dibuktikan pembayaran jaminan reklamasi (JAMREK). Menurut catatan kami sebagian besar perusahaan tambang di Kabupaten Rembang belum membayar JAMREK. Selain itu FPPP juga mendorong agar pengolahan bahan tambang tidak dilakukan diluar daerah akan tetapi diolah di Rembang dengan harapan bisa meningkatkan PAD dan merekrut sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal.

Sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang bisa menjadi andalan destinasi pariwisata di Jawa Tengah bahkan nasional. Karena daerah ini memiliki banyak potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Diantaranya banyak situs-situs sejarah, makam pahlawan dan pantai yang indah. Oleh karena itu FPPP minta Dinas terkait untuk melakukan terobosan dan inovasi dengan pemetaan dan membuat skala prioritas pembangunan dibidang pariwisata. Diantaranya dengan mengangkat budaya-budaya lokal yang memiliki nilai tinggi, dan memberi ruang pada generasi muda yang kreatif. Kami F-PPP juga mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan vestival batik di Lasem yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PPP yang kami sampaikan, Kurang lebihnya mohon 'maaf, teriring do'a semoga rahmat, taufiq dan hidayah-Nya senantiasa mengiringi langkah - langkah kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Amien, Amien, Amien yaa Robbal 'alamien...!

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, Rabu, 12 Nopember 2015

Fraksi PPP,

Ketua,


SUGIHARTO



Sekretaris,


ZAIMUL UMAM, NS

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015**



FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang, 12 November 2014

Dibacakan oleh : EDI KARTONO, SPd, MH



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH II
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT TERHADAP RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015
RABU, 12 NOVEMBER 2014
DI BACAKAN OLEH : EDI KARTONO, SPd, MH**

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Selamat pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang kami hormati :

1. Saudara Plt.Bupati
2. Saudara Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
4. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf.
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pandangan umum kami terhadap RAPBD Kabupaten Rembang TA. 2015 marilah kita selalu menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa , berkat limpahan rahmat, hidayah serta hidayah-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kebugaran tak kurang suatu apapun.

Dalam kesempatan ini kami Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa di awal masa jabatan ini kami berharap kita mempunyai semangat baru dalam melaksanakan tugas-tugas kita dan lebih optimal di masa-masa yang akan datang, seperti semangat kepahlawanan kita yang tidak pernah redup dalam mempertahankan NKRI, Pancasila dan UUD 45. Dan marilah kita selalu meneladani semangat pahlawan kita untuk bekerja lebih optimal kedepan dalam mengisi kemerdekaan ini. Kami Fraksi Demokrat menyampaikan prihatin atas terjadinya penyadaraan 15 kapal nelayan Sarang dan Kragan beserta 370 orang

ABKnya di Pulau Masalembu Kab. Sumenep awal bulan lalu, bahkan pembebasannya dengan uang tebusan 750 juta, penyanderaan tersebut sudah dikategorikan pemerasan parahnya lagi ada oknum aparat terlibat didalamnya. kami berharap Pemkab Rembang secara serius mengambil langkah langkah cepat supaya dikemudian hari tidak terjadi lagi.

Plt.Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dalam penyampaian pandangan Fraksi Demokrat ini kami memberikan beberapa saran, pendapat dan masukan demi kemajuan Kabupaten Rembang yang kita cintai ini, diantaranya :

1. Anggaran TPP yang sampai 11 M, kami berharap dengan adanya TPP yang begitu besar akan menambah semangat kerja para PNS dan mengoptimalkan kinerja. TPP harus dihitung berdasarkan beban kerja.
2. Untuk bidang RTH di DPU Kabupaten Rembang kami menyarankan penataan trotoar di kota Rembang yang sangat memprihatinkan kualitasnya sehingga anggaran miliaran rupiah terasa mubazir. Dibangun dengan harapan bertambah bagus tapi malah sebaliknya, coba kita lihat kabupaten tetangga trotoar dengan kramik dan casting yang bagus.
3. Untuk Satpol PP mohon Pemkab memperhatikan serius karena disamping belum punya kantor yang memadai, juga kinerjanya belum optimal.
4. BUMD yang menguntungkan harap diberi tambahan modal dan yang belum memberikan keuntungan supaya lebih diperhatikan kinerja dan modalnya.
5. Pemeliharaan jalan desa Lemah Putih Kecamatan Sedan supaya diperhatikan .
6. Diharap kepada Pemerintah Daerah supaya cermat dan tepat dalam menentukan harga pembebasan lahan untuk Embung Kaliombo .
7. Dimohon kepada Dinas Pariwisata supaya meningkatkan sektor-sektor pariwisata karena sumber daya alam Kabupaten Rembang untuk wisata sangat luar biasa.
8. Dimohon kepada Pemerintah Daerah Rembang khususnya Dinas terkait supaya memperhatikan mutu dan kualitas pendidikan dengan kurikulum 2013.
9. Mohon Dinas terkait untuk meningkatkan minat baca bagi anak-anak dengan meningkatkan kuantitas maupun kualitas perpustakaan daerah maupun perpustakaan sekolah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian pandangan umum Fraksi Demokrat kami sampaikan, semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah kita. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada segenap hadirin, kurang lebihnya kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

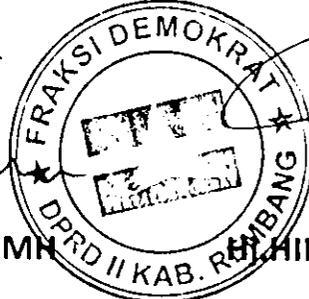
Rembang, 12 November 2014

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

SEKRETARIS


EDI KARTONO, SPd. MH



H. HIKMAH PURNAMAWATI



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Pemandangan Umum

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TERHADAP RAPERDA APBD TAHUN 2015

disampaikan oleh Ilyas

Pada Sidang Paripurna II DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 12 November 2014

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas (Plt). Bupati Rembang

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkomida); Komandan Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri Rembang; dan Ketua Pengadilan Agama Rembang

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat di lingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Suadar Sekretaris DPRD beserta jajarannya

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Pemandangan Umum ini perkenankanlah kami menghaturkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan rahmat Taufiq dan Hidayahnya sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-NYA. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW

Perkenankan FPKB mengucapkan selamat tahun Baru 1436 Hijriyah, semoga selalu ada hal baru untuk menyejahterakan masyarakat Rembang. Kami sampaikan selamat merefleksi Hari Pahlawan 10 November untuk menumbuhkan jiwa jiwa pahlawan dalam membangun daerah dan negeri tercinta.

Resolusi Jihad bagi sebagian besar masyarakat Rembang yang mencintai NU dan Ulama, adalah RESOLUSI JIHAD. Sebuah resolusi yang disumbangkan oleh NU untuk menjawab pertanyaan Presiden Soekarno "Apa hukumnya membela Negara". Untuk menjawab pertanyaan ini Rais Akbar PBNU KH. Hasyim Asy'ari mengumpulkan konsul atau cabang NU se Jawa dan Madura untuk menjawabnya.

Pada tanggal 22 Oktober 1945, Rais Akbar KH Hasyim Asy'ari, menyampaikan amanat berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam, pria maupun wanita, dalam jihad mempertahankan tanah air dan bangsanya. Rapat PBNU yang dipimpin Ketua Besar KH Abdul Wahab Hasbullah itu kemudian menyimpulkan satu keputusan dalam bentuk resolusi yang diberi nama "Resolusi Jihad Fii Sabilillah", yang isinya sebagai berikut:

"Berperang menolak dan melawan pendjajah itoe Fardloe 'ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang jang berada di loear djarak lingkaran tadi, kewadajiban itu djadi fardloe kifajah (jang tjoekoep, kalaoe dikerdjakan sebagian sadja..."

Inilah pembelajaran bagi bangsa Indonesia dari para Ulama jika mendapatkan kepercayaan dari Negara. Sekalipun bung Karno hanya member isyarat melalui pertanyaan karena kekhawatirannya beberap daerah telah dimasuki pasukan Sekutu dan NICA yang mengancam kedaulatan Negara.

KH. Hasyim Asy'ari memahami pesan dibalik pertanyaan Bung Karno, untuk itu diajaklah semua kyai/ulama NU untuk menjawabnya yang berarti mereka berkewajiban untuk memperjuangkannya. Kemudian kita tahu Resolusi Jihad ini menjadi pemicu kesadaran bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya., untuk itu kami mohonkan doa dengan membaca surat al Fatihah untuk para pahlawan kita semua. Al Fatihah.

Kami juga mengucapkan hari Kesehatan Nasional yang jatuh tepat hari ini 12 Nopember, semoga kita semua semakin sehat lahir dan batin... Besar sekali inarapan kami di dalam bulan muharram ini dan seterusnya, kondisi masyarakat Rembang bisa Ayem tentrem, Aman, tertib, damai dan bahagia sekaligus Rembang kota, lancar dan tidak terjadi kemacetan yang berarti.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.....

Terima kasih kepada Saudara Pimpinan yang memberikan kesempatan kepada FPKB untuk menyampaikan Pemandangan umum ini. Inilah pembahasan pertama kami dalam penganggaran daerah sebagai anggota DPRD periode 2014-2019. Jika di awal ini baik insyaallah akan baik untuk selanjutnya.

Kami juga sampaikan apresiasi kepada Saudara Bupati Rembang yang telah bekerja keras dalam masa transisi selama ini, semoga semakin berkurang **dominasi mayoritas** kekuasaan dalam menata kabupaten RembangSejujurnya kami lebih *sreg* dengan sebutan Bupati bukan lagi Plt. Bupati.

Terhadap RAPBD tahun 2015 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Plt. Bupati dalam Pengantar Nota Keuangan Raperda APBD tahun 2015 FPKB memberikan catatan atau pernyataan sebagai berikut :

1. Tentang Tidak adanya asumsi asumsi dasar dan pilihan skala prioritas

Sekalipun asumsi berupa hambatan pembangunan, sinkronisasi dengan pemerintah propinsi dan pusat, potensi daerah, pilihan strategi dan skala prioritas pembangunan Rembang tahun 2015 sudah tertuang dalam KUA-PPA dan Pagu Anggaran yang telah dibahas sebelumnya. Akan lebih tepat jika hal hal di atas secara ringkas disajikan dalam nota pengantar.

Pertanyaan yang patut kami sampaikan apakah besarnya serapan anggaran pada sektor sektor seperti yang tersaji dalam nota pengantar ini sekaligus menjadi skala prioritas? Jika benar apakah ada strategi pembaruan agar tidak terjebak pada penganggaran rutinitas pada sektor bersangkutan?

2. Tentang Struktur RAPBD

Tahun ke tahun struktur APBD kabupaten Rembang semakin naik yang menunjukkan kinerja tim anggaran yang baik pula. Kita juga sepakat dengan hal dasar bahwa hanya dengan APBD tak akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan strategi yang kuat agar APBD mampu mengungkit munculnya effect positif bagi pertumbuhan social ekonomi masyarakat. Artinya kita dapat melihat melalui data data yang disajikan oleh Pemkab terhadap hal ini.

Tentang Pendapatan yang masih minus 95 milyar dari belanja dan akan ditutup dari rencana silpa. Ini menunjukkan kebiasaan untuk menatabukukan silpa sebagai salah satu "pintu" menaikturunkan pendapatan sekaligus APBD. Bahwa semakin tinggi silpa menunjukkan akurasi perencanaan yang kurang baik. Jika silpa yang diperkirakan sebesar 97 milyar dibanding dengan APBD 2015 maka terdapat prosentase sebesar 7 % lebih anggaran yang tak sesuai

dengan perencanaan. Hemat kami toleransi terhadap perencanaan maksimal pada angka 5 %, apalagi jika masih menyediakan ruang dalam RAPBD Perubahan.

Hemat kami pula, atas kondisi ini masih memungkinkan bertambahnya pendapatan yang dapat direncanakan pada APBD 2015. Misalnya ; Pengembangan potensi keuangan pada tahun 2015 untuk memaksimalkan pengawasan retribusi daerah, mohon dijelaskan tentang turunnya retribusi daerah dari 32,816 milyar menjadi 25,369 milyar.

Pada struktur belanja kami memberikan catatan sebagai berikut :

- a. Pada belanja pegawai perlu diklarifikasi perencanaan antara jumlah pegawai yang sesuai dengan SK MenPan atau Mendagri, Daerah, maupun akses-nya, agar ada efisiensi dari belanja ini.
- b. Pada belanja social dan hibah di luar belanja bantuan social propinsi atau pusat sebesar 42 m, angka ini masih dapat ditoleransi karena hanya sekitar 3%.
- c. Pada Belanja Langsung perlu kami sampaikan besarnya belanja barang dan jasa yang hampir dua kali lipat dari belanja modal.

3. Tentang Beberapa Usulan

- a. **Segera dilakukan penataan menyeluruh terhadap jalan antar desa ataupun antar kecamatan yang menjadi tanggung jawab daerah.**
- b. **Insentif untuk guru madrasah diniyah, guru Paud, setelah saudara senasibnya selama ini yaitu perangkat desa yang telah mendapatkan harapan cerah dan pengelolaan dana desa.**
- c. **Pemkab Rembang agar bersandar pada konstitusi atas sengketa pelabuhan di Sluke saat ini**
- d. **Pemkab segera memfasilitasi kasus penyanderaan kapal nelayan Rembang yang beberapa waktu lalu disandera di Masalembu kepulauan Madura. Menegakkan hukum jauh lebih penting dari uang tebusan sebesar 750 juta rupiah. Juga agar nelayan dapat melaut tanpa ada kekhawatiran kekhawatiran pihak yang lain.**

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.....

Demikian pandangan ini kami sampaikan dan atas perhatian semua pihak kami sampaikan terima kasih.

Sebelum menutup pemandangan umum ini kami mewanti wanti agar pemkab mampu mengayomi dan memberikan pembelajaran secara baik terhadap para kepala desa dan perangkat desa terhadap alokasi dana desa yang cukup besar.

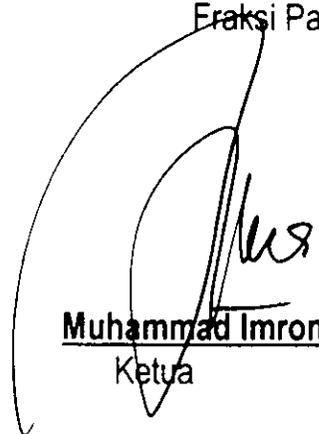
Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar – besarnya .

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aq wamittorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

Rembang, 12 November 2014

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

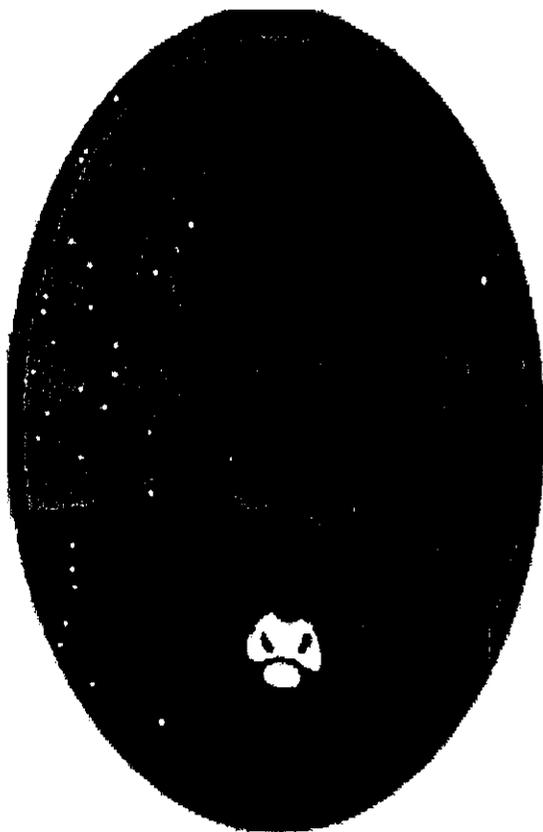

Muhammad Imron
Ketua


Ilyas
Sekretaris

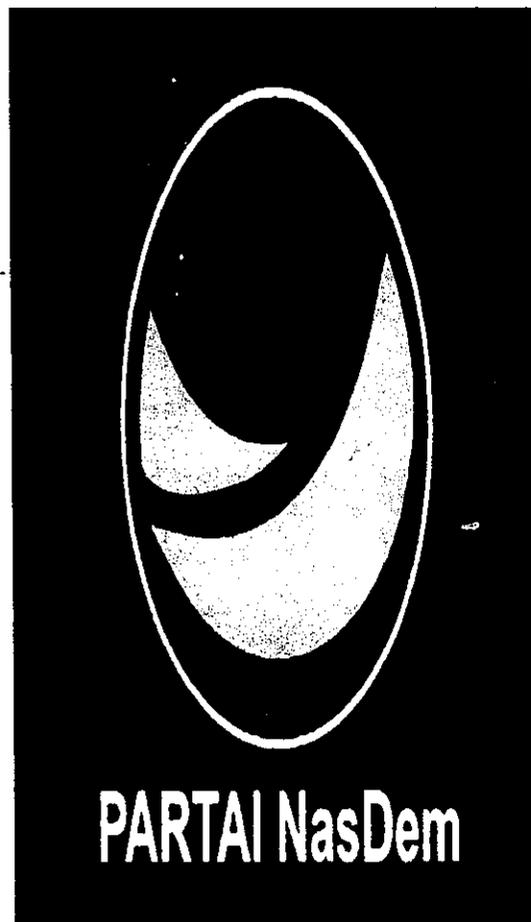
PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASIONAL DEMOKRAT

ATAS RAPERDA APBD TAHUN 2015



PDI PERJUANGAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

JL. P. DIPONEGORO NO. 88 REMBANG



PDI PERJUANGAN



PARTAI NasDem

FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 REMBANG

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2015

Dibacakan Oleh : **ALI IRCHAM, ST**

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Plt Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Rembang

Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan hidup. Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan berbagai berkah sehingga di pagi ini kami mampu menghadirkan Pemandangan Umum Fraksi PDIP NASDEM terkait RAPERDA APBD Kabupaten Rembang T.A 2015.

Setelah dilakukan diskusi-diskusi dan pembahasan terkait Pengantar Saudara Bupati tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2015, maka perkenankanlah di forum yang

terhormat ini kami menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian, yang kami rekomendasikan untuk menjadi perhatian Pemkab Rembang juga. hal-hal tsb ialah berikut ini :

1. Mengingat demi kinerja yang lebih baik lagi untuk menjalankan tugas – tugas menegakkan PERDA maka kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendorong saudara Plt Bupati untuk menganggarkan pembangunan gedung Kantor baru untuk SATPOL PP. Kami sungguh prihatin karena selama ini SATPOL PP harus meminjam gedung untuk menunjang tugas tugasnya. Sama halnya dengan SATPOL PP kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem juga berharap untuk menunjang kinerja BPBD maka Pemkab perlu pembangunan gudang untuk menyimpan semua aset yang dimiliki kantor BPBD.
2. Mengingat sangat besarnya kontribusi dari sector perikanan Rembang dan demi asas keadilan, untuk menunjang pendapatan dan produksi ikan, untuk mempermudah perapatan kapal dan pemasaran ikan hasil tangkapan para nelayan kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mengharapkan untuk pembangunan dermaga pelabuhan tidak dititik beratkan di satu pelabuhan saja. Kami harap ada pemerataan pembangunan dermaga untuk Pelabuhan Pelabuhan lain misalnya pelabuhan Kragan dan Sarang yang kami anggap masih jauh dari yang semestinya. Sebagaimana program pemerintahan Jokowi – JK melalui program NAWA CITA yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia patut di apresiasi oleh semua kalangan. Mengingat Indonesia mempunyai laut yang salah satu terluas di dunia dan secara geografis sangat mungkin akan hal itu. maka kabupaten rembang dengan panjang sekitar 65 km, sangat mungkin untuk dilakukan konektivitas dan kesinambungan dg program pemerintah pusat tsb. Pertanyaan kami upaya apa yang akan dilakukan pemkab Rembang dalam menangkap isu tsb?
3. Untuk permasalahan akhir – akhir ini yang terjadi terhadap nelayan kita dimana terjadi penahanan dan permintaan tebusan yang dianggap terjadi pelanggaran berat yang dilakukan nelayan kita di Masalembu . Dan nelayan harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit sejumlah 750 juta untuk membebaskan kapal dan ABK nya. Ini sungguh kami sayangkan karena dari nelayan Sarang tidak melanggar UU batas perairan daerah tangkap ikan mereka. Bahkan penahanan nelayan kita tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum misal Polairut atau TNI AL tetapi dari nelayan setempat yang menganggap nelayan kita melanggar batas perairan daerah tangkap ikan mereka dan penangkapan tersebut tidak di sertai bukti hukum yang kuat / jelas. Mohon ini menjadi perhatian Pemkab untuk melindungi warga yang mengalami masalah hukum di daerah lain dan mohon diproses secara hukum.
4. Sehubungan dengan perubahan beberapa kementerian / lembaga dibawah kabinet kerja seperti sektor kehutanan dan lingkungan hidup kami mendesak kepada saudara Plt bupati agar segera melakukan penyesuaian sepatutnya guna menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
5. Dengan berlakunya UU ttg Desa maka penataan, pendataan ulang menuju penguatan dan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa mutlak segera dilakukan .Sehingga kami perlu pertanyakan, langkah apa saja yang akan dilakukan pemkab Rembang dalam menyambut berlakunya UU tsb?
7. Sesuai tujuan awal adanya program BPJS yaitu untuk mempermudah pelayanan kesehatan di kabupaten Rembang tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Yang terjadi masyarakat kesulitan dalam hal pengurusan persyaratannya. Jadi program ini tidak lagi mempermudah tapi malah mempersulit karena persyaratannya yang selalu berubah dan semakin sulit. Dan seharusnya program ini di ikuti dan diimbangi dengan sarana dan prasarana pelayanan di Rumah Sakit yang baik juga.
8. Dalam kajian yang kami lakukan kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem belum menemukan adanya program Pemkab yang menonjol terkait janji kampanye saudara yg dibiayai APBD kab. Rembang th 2015 ini ? jika memang ada, berapakah anggaran yg digunakan utk membiayai program prioritas tsb.
9. Terakhir, mengenai pengauditan Pelabuhan guna memperjelas status pelabuhan Tanjung Bonang. Dengan pemaparan saudara Plt Bupati kemarin bahwa BUMD mengalami deficit,

langkah – langkah apa yang akan dilakukan saudara Plt Bupati untuk penanganan BUMD untuk tahun 2015 nanti.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan

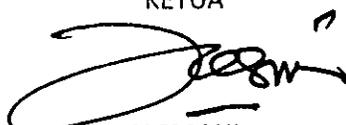
Demikian Pendapat Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini dibuat, semoga ada guna dan manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf.

Billahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu alaikum wr. Wb.

M E R D E K A .!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN
NASDEM
DPRD KAB. REMBANG

KETUA

JASMANI



SEKRETARIS

ALIRCHAM ST

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015**



REMBANG, 12 NOVEMBER 2014

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015

Disampaikan oleh Puji Santoso, SP, MH.
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 12 Nopember 2014

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Sdr. Plt. Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkuangan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali kalimat pembuka, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Ke 2 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun 2015 dengan baik dan lancar, semoga apa yang telah kita kerjakan ini menjadikan amal dan ibadah yang bermanfaat.

Selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rosullullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Rembang mengucapkan hari Sumpah pemuda 10 November tahun 2014, semoga kita dapat meneruskan perjuangan para pejuang bangsa Indonesia dengan cara menjadikan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera, adil dan makmur.

Sehubungan dengan pembahasan Raperda APBD kabupaten Rembang Fraksi Gerindra mendasar dari kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang akan memberikan beberapa catatan-catatan kritis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah kabupaten Rembang selaku pemegang saham mayoritas di PT. RBSJ untuk kesekian kalinya kami ingatkan untuk segera menggelar RUPS, karena RUPS merupakan pintu masuk bagi PT. RBSJ untuk segera bisa menyerahkan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Rembang. dengan disetornya deviden bisa menambah pundi-pundi PAD yang ujung-ujungnya bisa menambah/ membiayai kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang.

2. Sebagaimana kita pahami, bahwa Kabupaten Rembang saat sekarang sudah menjadi ikon seksi di Jawa Tengah. Hal ini dapat kita rasakan, ternyata konsep pengembangan investasi banyak dilakukan di Jawa Tengah utamanya Kabupaten Rembang. Pendirian pabrik semen di daerah Rembang selatan, pendirian PLTU di daerah Rembang Timur. Pasti secara operasional kita membutuhkan sarana memadai untuk memediasi keadaan-keadaan genting ini, selama perusahaan-perusahaan besar itu sudah beroperasi. Namun pastinya, satu hal yang tidak boleh kita abaikan. Apapun yang kita rencanakan harus ada kontribusi dalam rangka menaikkan Pendapatan Asli Daerah dengan maksud utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga Rembang.

Bertolak dari keadaan krusial ini. Kami dari Fraksi Gerindra mengharap kepada pihak eksekutif sebagaimana konsep otonomi daerah, yakni ikut memfasilitasi keseriusan terbitnya perijinan terbangunnya infrastruktur memadai pelabuhan berkapasitas nasional di Kabupaten Rembang.

Adapun wujud keseriusan yang kami harapkan dari pihak eksekutif yaitu; (1) dalam pelaksanaannya harus merunut sesuai aturan yang berlaku. (2) selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan berlangsung dipastikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) sehingga realisasi dari pembangunan pelabuhan berskala nasional di Kabupaten Rembang dapat beroperasi secara

legal, tidak mensuasanakan ketidakjelasan semacam keadaan selama ini. Apalagi ada berita pada pagi hari ini telah terjadi insiden terhadap seorang petugas pengecekan tambang (*checker*) yang dihajar oknum supleyer tambang batu. kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar keberadaan pelabuhan ini bisa dikelola dengan baik dan benar sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Kami dari Fraksi Gerindra mengharap kepada Pemerintah Kabupaten Rembang bersama-sama pihak terkaid harus segera membedah segala permasalahan yang ada di Pelabuhan Tanjung Bonang sluke baik terkaid dengan keabsahan proseas-proses perijinan beserta dokumen-dokumen yang mendasarinya terkaid status tanah di areal Pelabuhan, posisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta keterlibatan swasta dalam bidang pendanaan, bagaimana keterkaitan hak-hak dan kewajiban para pihak atas pelabuhan tersebut sehingga potensi-potensi konflik dikemudian hari yang mungkin timbul atas pengelolaan pelabuhan tersebut seminimal mungkin dapat dihindari dan yang paling penting Pemerintah Kabupaten Rembang bisa mendapatkan Pendapatan yang sebesar-besarnya atas beroperasinya Pelabuhan tersebut mulai sekarang dan dikemudian hari, karena kawasan Pelabuhan tersebut masih merupakan otoritas wilayah dari pemerintah Kabupaten Rembang. untuk itu Pemerintah Kabupaten Rembang harus segera menyiapkan regulasi lokal atau Peraturan Daerah yang mengatur semua aktifitas yang berhubungan dengan operasional Pelabuhan sehingga kepastian para pihak menjadi lebih terjamin.

3. bahwa implementasi dari PP 43 Tahun 2014 di Kabupaten Rembang terutama yang terkaid dengan masa jabatan Perangkat Desa haruslah tetap menunggu revisi Perda nomor 3 tahun 2013 yang mengatur tentang Perangkat Desa.
4. Terkaid Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, masih banyak kita jumpai hal-hal yang sifatnya belum teknis. Sebagaimana contoh dalam isi PP ini hanya sebatas membahas tahapan pelaksanaan yang masih mengesankan sesuatu kurang detail dan mengesankan tidak responsif terhadap keadaan senyatanya. Semisal dalam tahapan sebagaimana di atur dalam pasal 41 PP No. 43 Tahun 2014 hanya menyebut: Pertama; tahap persiapan, Kedua; tahap pencalonan, Ketiga; tahap pemungutan suara, dan Keempat; tahap penetapan.

Padahal dalam kalender pelaksanaan Pilkadaes yang sempat di laksanakan setahun yang lalu di Kabupaten Rembang sempat menyisakan beberapa persoalan krusial, dan merupakan representasi keadaan krisis masyarakat. Adapun masalah-masalah sebagaimana kami maksudkan yaitu; beberapa pelaksanaan di beberapa desa tidak mengadakan ruang adanya penyampaian visi dan misi calon kepala desa, tingkat money politic dominan dan justru faktor pemicunya bukan serta merta dilakukan oleh pasangan calon kepala desa namun justru para botoh. Artinya seterilisasi pelaksanaan yang bebas dari intervensi pihak-pihak tidak bertanggungjawab belum mampu kita hapuskan dari pelaksanaan demokrasi yang paling fundamental. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rembang harus segera mengajukan Perubahan pada Perda yang mengatur tentang tata cara Pemilihan Kepala desa.

Pertimbangan lainnya. Sebagaimana kita ketahui dalam waktu dekat ini. Sekitar bulan September 2015 kabupaten/kota sejumlah 17 di Jawa Tengah berencana menggelar secara serentak pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Secara regulasi baik pelaksanaan langsung Perpu Nomer 1 tahun 2014 maupun melalui perwakilan anggota DPRD UU Nomer 22 tahun 2014 pastinya ada sesuatu yang beda. Mengingat pelaksanaan tinggal beberapa waktu ada beberapa hal cukup krusial yang sekiranya perlu kita persiapkan. Pertama, seandainya pelaksanaan secara langsung terkait pilkada saya pikir kita bisa mengfungsikan, fungsi pengawasan yang dimiliki dewan. Kedua, seandainya pilihan melalui perwakilan DPRD kita memungkinkan bisa mempersiapkan rumusan kepanitiaan. Sehingga amanat rakyat yang lebih besar tidak terabaikan. Berbarengan dengan rencana pelaksanaan Pilkadaes, tentunya kita harus realistis untuk menentukan skala prioritas.

5. Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SiLPA ada dua, yakni: *Pertama*; untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) dan *Kedua*; membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni.

Hal menarik yang sering terabaikan sesungguhnya tujuan utama dari realisasi APBD yakni: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (2) meningkatkan pelayanan masyarakat, (3) mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, dan (4) mempercepat pengelolaan potensi daerah.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan pandangan kami sebagaimana tersebut. Dari Fraksi Gerindra, intinya meminta pihak eksekutif agar benar-benar serius dalam merencanakan dan melaksanakan Peraturan Daerah APBD mendatang. Kemudian pihak eksekutif juga harus senantiasa membiasakan bersikap konsisten terhadap apa yang sudah direncanakan. Melihat keadaan nilai SILPA sebesar itu, artinya eksekutif kurang serius dalam melaksanakan APBD yang seharusnya bisa dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat Rembang tahun ini menjadi tidak bisa.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hikmah, dan tepat. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 12 Nopember 2014

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG


HERI KURNIAWAN, SE.
Ketua





PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN
REMBANG

terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang - Tahun Anggaran 2015

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang

Hari Rabu, 12 Nopember 2014

Juru Bicara : H. JOKO SUPRIHADI, SH.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Plt. Bupati .
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi Karya Sejahtera mengajak hadirin semua untuk mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridho dari-NYA. Mari merenung sejenak memperingati Hari Pahlawan 10 Nopember yang lalu, mengenang para pahlawan yang telah berkorban demi bangsa dan negara.

Pertama kali Fraksi Karya Sejahtera tampil dihadapan publik dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang ini perkenankanlah kami memperkenalkan diri. Fraksi Karya Sejahtera beranggotakan 4 orang, gabungan dari Anggota DPRD Partai GOLKAR 3 orang ditambah 1 orang anggota dari Anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera. Walaupun minimalis kami akan tetap berkarya maksimalis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

Saudara Plt. Bupati dan para hadirin sekalian.

Pada kesempatan ini Fraksi Karya Sejahtera akan menyampaikan Pemandangan Umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 yang telah disampaikan oleh Saudara Plt. Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang Hari Senin 10 Nopember 2014 yang lalu, sbb.

- Pada RAPBD TA 2015 ini kami melihat SILPA yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen SKPD dalam melaksanakan pembangunan kurang optimal, sehingga berpengaruh pada jalannya pembangunan dan berdampak pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.
- Fraksi Karya Sejahtera merasa kecewa terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, berkenaan tidak terlaksananya pembangunan TPI Kragan padahal anggarannya sudah tersedia. Hal ini berpengaruh apa Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan yang selama ini kita banggakan sebesar hampir Rp. 12 milyar pertahun.
- Masih kepada Dinas Perikanan dan Kelautan serta instansi terkait lainnya, kami ingin bertanya bagaimana proteksi/perlindungan kepada para nelayan yang menjadi korban penangkapan liar oleh sekelompok nelayan di daerah Masalembu.
- Fraksi Karya Sejahtera menyoroti pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pendapatan dari Pelabuhan Umum Nusantara "Tanjung Bonang" yang ada di Sluke. Kemana larinya pendapatan bongkar muat yang selama ini telah berjalan?
- Kami juga ingin bertanya: "Bagaimana nasib RBSJ? Sudah RUPSKah? Bagaimana dengan janji devidennya? Disamping SPBU, usaha apa saja yang sudah dilakukan?"
- Untuk kesekian kalinya kami menghimbau agar jajaran pegawai di lingkungan Pemkab Rembang meningkatkan disiplin dan

mengutamakan pelayanan publik. Semua SKPD yang menjalankan fungsi pelayanan publik hendaknya melayani masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, jangan sampai ada alasan pejabat yang berwenang sedang cuti atau sedang pergi. Kepada SKPD pembina kepegawaian (BKD dan Inspektorat) harus selalu mengawasi kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

- Dalam hal pelaksanaan proyek pembangunan hendaknya diawasi secara seksama, sehingga menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih baik. Menurut pengamatan kami sekarang ini banyak pekerjaan yang berkualitas rendah atau kurang baik.
- Mengenai upaya menjaga kualitas jalan (terutama jalan yang dilalui truk galian C) agar tidak cepat rusak, agar timbangan tonage kendaraan agar segera dipasang.

Saudara pimpinan sidang dan para hadirin sekalian.

Sebelum mengakhiri pemandangan umum ini kami ingin mengingatkan bahwa semua yang hadir di ruangan ini adalah pemimpin, pemuka masyarakat. Perkenankanlah kami mengutip pesan Prabu Yudhistira ketika mewisuda Raden Parikesit sebagai penerus Kerajaan Amarta yang kemudian disebut sebagai ajaran 3 H (telu ha). Konsep "3 ha" tersebut adalah "hamong, hamot lan hamemangkat".

1. **Hamong**, seorang pemimpin/raja harus sanggup berperan sebagai pamomong yaitu orang yang melayani bukan seorang yang selalu minta dilayani. Sebagai abdi masyarakat menuntut sikap tidak mudah mencela.
2. **Hamot**, berarti mampu menerima (amot / mewedahi) semua hal yang didengar atau disampaikan oleh orang lain, mendengarkan keluhan dan aspirasi dari rakyat
3. **Hamemangkat**, menjaga derajat dan kedudukan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin/raja harus menjaga martabat pribadi dan negara dengan menjaga tingkah

laku yang baik dan menjadi panutan dan suri tauladan bagi rakyatnya.

Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang. Rahayu ingkang samya pinanggih.

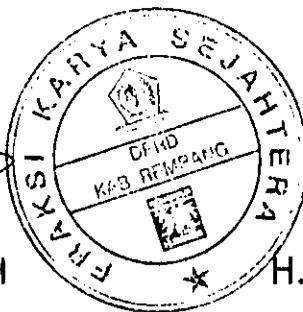
Wassalamu alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

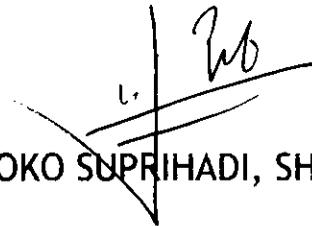
Ketua,



H. T S M A R I, SH



Sekretaris,



H. JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM
TERHADAP
RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

Dibacakan Oleh : Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng, S.Pd.

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Plt. Bupati Bupati Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD T.A 2014 dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Memperhatikan penjelasan Bupati tentang Raperda APBD T.A 2015 dan diskursus yang berkembang dalam rapat Badan Anggaran bersama TAPD Kab. Rembang, maka kami dari fraksi Harapan perlu kiranya menyampaikan beberapa hal :

1. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa, kami harapkan dialokasikan anggaran untuk pendampingan dari sisi teknis, administrasi atau hukum. Pendampingan ini kita perlukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan ataupun paska kegiatan, sehingga proses pembangunan di tingkat Desa dapat berjalan dengan baik. Alokasi dana ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar program yang akan dilaksanakan oleh Desa tidak tumpang tindih dengan program dari Pusat, Provinsi atau Daerah. Sekaligus untuk menjaga agar program ini berjalan efektif dan efisien.
2. Sampai saat ini Kantor Satpol PP masih berstatus pinjam pakai, untuk itu kami mengusulkan pada T.A 2015 dialokasi anggaran untuk pembangunan Kantor Satpol PP.
3. Mengingat bahwa Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang belum mendapat porsi waktu pembahasan, maka pengelolaan dana Bantuan Sosial bagi Nelayan masih menjadi kewenangan pemerintah daerah

Kabupaten Rembang. Kami meminta SKPD dan Komisi terkait mencermati dan membahas secara mendetail, karena terkait dengan target Restribusi Daerah dan alokasi Bantuan Sosial T.A 2015.

4. Memperhatikan rekomendasi BPK, kami mengusulkan alokasi anggaran pembangunan Gudang penyimpanan alat-alat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Kami mengapresiasi komitmen pemerintah daerah pada bidang pendidikan, yang dibuktikan dengan komitmen penganggaran sebesar Rp. 556.500.000.000,- atau 40,18 % dari total Belanja Daerah. Kami mengharapkan komitmen itu tidak berhenti pada kebijakan penganggaran saja, tetapi juga perlu segera disusun perencanaan program pendidikan yang komprehensif yang terkait dengan peningkatan kualitas guru, infrastruktur pendidikan dan memperkuat pendidikan informal dan non formal.
6. Sebagai wujud komitmen pemerintah pada aspek sosial kemasyarakatan, kami mengharapkan dialokasikan anggaran untuk ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), dan korban kekerasan seksual. Pendampingan psikologis, kesehatan dan peningkatan kemampuan dan modal kerja sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi ODHA atau korban kekerasan seksual.
7. Saat ini masyarakat sangat mengharapkan terlaksananya program Kartu Indonesia Sehat. Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program BPJS, kami meminta SKPD terkait untuk segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
8. Pada setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seringkali kita temui anggaran belanja untuk komputer, lap top atau *note book*. Kami mengharapkan pemerintah daerah untuk segera menyusun rencana kebutuhan tentang barang-barang tersebut di masing-masing SKPD, sesuai dengan beban kerjanya.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Berkaitan dengan pembahasan Raperda APBD T.A 2015, kami perlu mengusulkan beberapa hal untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Daerah, yaitu :

1. Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah berkaitan dengan :
 - a. Perubahan Bagian Pemerintahan menjadi Kantor atau Badan, mengingat tantangan tugas yang semakin berat berkaitan dengan penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan memungkinkan di *breakdown* hingga tingkat kabupaten/kota untuk mencapai kinerja yang lebih optimal.
 - c. Komitmen Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian laut (larangan pengebangan hutan bakau, penggunaan zat kimia, penjualan makhluk laut yang sedang bertelur, dll) harus diikuti dengan penyusunan Perda tentang hal tersebut diatas. Perda tentang perlindungan kelestarian laut adalah *good will* pemda sekaligus pintu masuk untuk mendapatkan program-program dari Pemerintah.

- d. Melihat perkembangan jumlah kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, kami memandang perlu agar Dinas tersebut dibagi menjadi 2 atau 3 Dinas yang terpisah. Sebagai contoh Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air dijadikan dinas tersendiri.
2. Penyusunan Perda Tentang Bencana Alam
3. Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah, sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. Penyusun Perda Perlindungan Anak dan Perempuan

Hal tersebut diatas perlu kami sampaikan, mengingat dalam penyusunan Perda dibutuhkan alokasi anggaran untuk penyusunan Naskah Akademik, Audiensi atau kunjungan kerja jika dibutuhkan.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Mulai tanggal 14 November 2014, masing-masing Komisi akan memulai pembahasan Raperda APBD Tahun 2015. Supaya lebih optimal, dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar dapat dipersiapkan lebih awal. Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Harapan, semoga pembahasan Raperda APBD T.A 2015 ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT Amin.

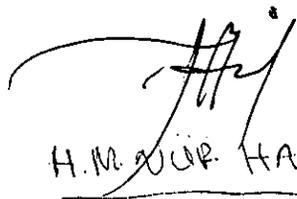
Billahi raufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 12 November 2014

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Ketua


H. M. NUR HASAN, S.H., M.H.

Sekretaris


S. H. W. S. H., S.E.



JAWABAN BUPATI REMBANG

**ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS
PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



TAHUN ANGGARAN 2015



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang,
- Tamu undangan yang kami hormati, tokoh masyarakat, wartawan dan segenap jajaran eksekutif yang berbahagia.

Mengawali sambutan saya terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

No	PERTANYAAN	JAWABAN
<u>I. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>		
1	Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 mengalami kenaikan rata-rata 450 juta per desa pertahun harus diikuti dengan kualitas manajemen monitoring pengawasan dan evaluasi keuangan desa secara baik. Perangkat desa perlu dibekali dengan peningkatan manajemen keuangan dengan diadakan pelatihan administrasi keuangan.	Terimakasih atas sarannya, dan telah diagendakan Pemkab. Rembang. Langkah pertama yang telah kami siapkan akhir Nopember 2014 ini adalah pemberian pelatihan bagi aparatur desa pada semua desa dalam penyusunan APB Desa untuk tahun 2015, dan selanjutnya akan kami lakukan pembinaan rutin terkait pengelolaan administrasi keuangan desa baik berupa bimbingan maupun pelatihan bagi aparatur desa.
2	Dengan alokasi dana bidang Pendidikan 40,13% dari total belanja daerah atau sebesar Rp.556,5 milyar seharusnya masyarakat mendapat akses pendidikan disemua jenjang dan perbaikan sekolah agar dilaksanakan sesuai peruntukannya dengan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan maupun kualitas infrastruktur sekolah	<p>Pemerintah Kabupaten Rembang telah membuka akses seluas-luasnya untuk pendidikan di semua jenjang untuk masyarakat rembang dengan berbagai upaya diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Desa 1 PAUD - Pendidikan Inklusi - SMP Satu Atap di daerah terpencil - Sekolah Gratis Jenjang Pendidikan Dasar - Sekolah gratis jenjang pendidikan menengah bagi keluarga kurang mampu <p>Terkait dengan pembangunan sarana prasarana pendidikan sudah disesuaikan dengan kebutuhan untuk menunjang pembelajaran yang dibiayai dari Dana APBN (DAK), APBD Provinsi (Bantuan Keuangan) dan dari APBD Kabupaten. Dan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana sekolah telah dilakukan pengawasan secara berkala baik melalui konsultan pengawas maupun dari tim monitoring dan evaluasi Dinas Pendidikan.</p>
3	Dinas Pendidikan harus mempunyai Program Evaluasi berkala terhadap guru yang bersertifikasi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru.	Program evaluasi berkala terhadap kinerja guru yang telah bersertifikat dan mendapatkan tunjangan profesi guru adalah melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pengawas Satuan Pendidikan (pengawas sekolah), dan melalui rapat-rapat koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemantauan kinerja guru yang dilakukan Dinas Pendidikan

No	PERTANYAAN	JAWABAN
4	<p>Perlu ada sistem yang terintegrasi antara puskesmas dengan RSUD dr. R. Soetrasno Rembang terutama dalam hal validasi data dan pelayanan rujukan.</p>	<p>Pelayanan warga miskin di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang dilayani dengan 2 (dua) jaminan fasilitas pelayanan yaitu JKRS dan JKN. Pelayanan yang selama ini berjalan adalah persyaratan administrasi untuk kedua pelayanan tersebut yaitu foto copy kartu peserta, KTP dan KK, sedangkan untuk pasien rawat inap persyaratan perlu dilengkapi dalam waktu 3 kali 24 jam hari kerja sejak pasien masuk rumah sakit, Untuk validitas data warga miskin yang mendapatkan jaminan dilakukan oleh petugas JKRS bagi peserta JKRS dan Petugas BPJS bagi peserta JKN yang ditugaskan di Rumah Sakit.</p>
5	<p>Peran Puskesmas Perlu dimaksimalkan dalam pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat.</p>	<p>Pembangunan Kesehatan saat ini mengacu pada PARADIGMA SEHAT, dimana pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih mengutamakan upaya preventif dan promotif selain upaya kuratif dan rehabilitatif . Berkaitan dengan Paradigma Sehat tersebut, Prioritas Program pembangunan di Kabupaten Rembang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan b. Program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat c. Program Peningkatan Mutu dan Akses ke Pelayanan Kesehatan d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat <p>Untuk melaksanakan Program Prioritas tersebut , Upaya / kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyebaran luasan Informasi kesehatan kepada masyarakat b. Pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan dengan LSM , Ormas dan pihak Swasta dalam rangka c. Pendidikan kesehatan masyarakat melalui berbagai media Promosi kesehatan d. Pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat serta pemeriksaan kualitas air .

No	PERTANYAAN	JAWABAN
6	<p>Dintanhut agar memajukan dan meningkatkan kualitas para petani dengan sistem pertanian yang modern, dan menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi.</p> <p>Penambahan embung untuk memenuhi kebutuhan air baik untuk pengairan teknis maupun air bersih.</p>	<p>Dinas Pertanian dan Kehutanan telah menetapkan Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Sumber Daya Manusia (Petani) melalui kegiatan-kegiatan : pengembangan pupuk organik, mekanisme pertanian melalui bantuan traktor, pompa air dan ala pasca panen.</p> <p>Untuk mencukupi kebutuhan pupuk pemerintah Kabupaten Rembang telah menyusun rencana kebutuhan pupuk yang diajukan kepada pemerintah provinsi, alokasi pupuk tahun 2014 sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan petani akan pupuk urea: 23.136 ton, ZA: 9.220 ton dan SP.36 : 4.087 ton.</p> <p>Untuk mencukupi kebutuhan air Pemkab Rembang melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan pada setiap tahun selalu menganggarkan pembangunan embung, dam parit dan sumur pantek.</p>
7	<p>Bantuan Sosial dan Hibah kepada Nelayan dan bakul harus disertai monitoring dan evaluasi agar tepat sasaran.</p>	<p>Program-program pemberdayaan yang pro nelayan sudah banyak dilaksanakan baik dari anggaran Pemerintah Pusat melalui KKP maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang hal ini dapat dilihat dari Program Prioritas Peningkatan kehidupan nelayan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan sertifikasi tanah nelayan - Kegiatan listrik mudah untuk nelayan - Kegiatan penyediaan air bersih berbasis TPI/PPI - Kegiatan bantuan kegiatan usaha bersama (KUB) untuk nelayan - Pembangunan infrastruktur perikanan tangkap untuk nelayan <p>Untuk program pemberdayaan nelayan melalui bantuan sosial maupun hibah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan dilaksanakan verifikasi dilapangan untuk menjamin tepat sasaran.</p> <p>Untuk monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pembinaan dan mengevaluasi keberhasilan program pemberdayaan nelayan.</p>

No	PERTANYAAN	JAWABAN
8	<p>Sebagian besar perusahaan tambang buluni membayar Jaminan Reklamasi (JAMREK). Pengolahan bahan tambang agar dilakukan di Rembang untuk menambah PAD dan penyerapan tenaga kerja lokal.</p>	<p>Telah dilakukan upaya-upaya untuk mendorong pengusaha membayar JAMINAN REKLAMASI dan sudah dalam proses pembayaran. Kedepan untuk pengelolaan bahan tambang diusahakan untuk di Rembang.</p>
9	<p>Disbudparpora agar melakukan terobosan dan inovasi dalam hal pemetaan dan pembuatan skala prioritas proyek pembangunan kepariwisataan</p>	<p>Situs-situs sejarah yang memiliki potensi sebagai destinasi pariwisata :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Museum RA Kartini 2. Makam RA Kartini 3. Kawasan Pecinta Kota Lasem 4. Situs Perahu Kuno Punjulharjo 5. Pasujudan Sunan Bonang 6. Situs Megalitikum Terjan 7. Situs Manusia Austronesia Suke

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	II. FRAKSI DEMOKRAT	
1	Pemb. Rembang diharapkan mengambil langkah cepat terkait penyanderaan kapal nelayan Sarang dan Kragan yang meminta uang tebusan	Penyelesaian konflik nelayan di Masalembu sudah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan bersama instansi terkait bersama pemilik kapal mengadakan pertemuan dengan nelayan Masalembu, yang hasilnya para pemilik dikenakan denda sebesar Rp.50.000.000,00 per kapal. Dengan mempertimbangkan keselamatan kapal beserta ABKnya maka dengan sangat terpaksa denda tersebut dibayarkan oleh para pemilik kapal. Untuk kedepan agar konflik tersebut tidak terulang kembali maka Pemerintah Kabupaten dalam waktu dekat akan melaksanakan koordinasi dengan KKP dan instansi terkait termasuk menempuh jalur politis sesuai dengan hasil audiensi para pemilik kapal dengan DPRD Kab. Rembang pada tanggal 11 November 2014.
2	Anggaran TPP yang besar diharapkan menambah semangat kerja para PNS serta mengoptimalkan kinerja, dan TPP harus dihitung berdasarkan beban kerja.	Pemberian TPP oleh Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengacu sebagaimana di atur dalam Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan kriteria berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
3	Penataan trotoar dikota Rembang memperhatikan kualitasnya, mohon penjelasannya dari bidang RTH	Perencanaan penataan trotoar perkotaan perlu adanya masukan terutama untuk pemilihan bahan, apakah dibuat dengan menggunakan bahan keramik, paving atau yang lain. Penataan trotoar pada saat ini dilaksanakan menggunakan koral sikat, namun dalam pelaksanaannya khusus trotoar Jl. Kartini rekanan kurang memperhatikan dan ini telah kami perintahkan untuk diperbaiki.
4	Satpol PP belum mempunyai fasilitas yang memadai sehingga kinerjanya belum optimal mohon perhatiannya dari Pemb. Rembang	Terima kasih akan kami perhatikan
5	BUMD yang menguntungkan diharapkan diberi tambahan modal dan yang merugikan agar diperhatikan kinerja dan modalnya	Pada dasarnya kami sependapat, bahwa dalam rangka pengembangan BUMD dan peningkatan PAD perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rembang baik berupa tambahan setoran modal maupun kebijakan/regulasi yang mendukung perkembangan BUMD.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
6	Pemeliharaan jalan desa Lemah Putih Kecamatan Sedan mohon diperhatikan	Mengingat keterbatasan anggaran untuk penanganan Infrastruktur jalan tahun 2014 maka kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang.
7	Pemerintah Daerah diharapkan cermat dan cepat dalam menentukan harga pembebasan lahan untuk Embung Kaliombo	Untuk menentukan harga tanah dalam pembebasan lahan untuk Embung Kaliombo terlebih dahulu dilakukan studi Dokumen Perencanaan dan Appraisal Harga Tanah. Penentuan harga tanah dilakukan dalam Appraisal Harga Tanah yang dilaksanakan oleh Badan Hukum yang telah memiliki sertifikat/lisensi dari BPN, dengan tenaga-tenaga ahli yang telah bersertifikat pula. Jadi dalam penilaian nanti tentunya akan dilakukan secara cermat dan tepat, namun juga masih dalam batas kewajaran sesuai dengan daya dukung lahannya.
8	Dinas Pariwisata agar meningkatkan sektor-sektor pariwisata	Kabupaten Rembang yang kaya dengan potensi wisata untuk menjadikan magnet kunjungan wisata diperlukan kiat-kiat agar potensi tersebut menjadi daya tarik wisatawan diantaranya; <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan daya tarik wisata di lingkungan obyek wisata, karena membutuhkan anggaran yang besar maka upaya Pemkab adalah melakukan kerjasama dengan investor dan pengusulan anggaran ke APBD daerah sampai dengan pusat 2. Menarik wisatawan dengan event-event yang menjadi ikon Rembang 3. Melakukan peningkatan SDM kepada pelaku usaha pariwisata contoh: desa wisata, hotel, restoran, biro perjalanan dan usaha pariwisata yang lain.
9	Pemerintah Daerah Rembang diharapkan memperhatikan mutu dan kualitas pendidikan dengan kurikulum 2013	Peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi kurikulum 2013, langkah-langkah yang telah ditempuh: <ul style="list-style-type: none"> - Kurikulum 2013 telah diimplementasikan di semua sekolah pada semua jenjang (Kelas 1, 2, 4 dan 5 SD, Kelas 7 dan 8 SMP, Kelas 10 dan 11 SMA/SMK).

No	PERTANYAAN	JAWABAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Melatih guru sasaran SD sebanyak 1960 (guru kelas 1, 2, 4, 5 tuntas), Guru sasaran SMP sebanyak 560, guru SMA sebanyak 119 dan Guru SMK sebanyak 135. Untuk guru sasaran SMP, SMA/SMK sampai dengan saat ini pelatihan masih berjalan. - Melatih pengawas SD sebanyak 66, pengawas SMP sebanyak 7, pengawas SMA sebanyak 2 dan pengawas SMK sebanyak 3. - Melatih kepala sekolah SD sebanyak 374, kepala SMP sebanyak 54, kepala SMA sebanyak 14 dan Kepala SMK sebanyak 24. - Melakukan pendampingan implementasi kurikulum di semua sekolah oleh instruktur nasional. <p>Pembelian buku kurikulum 2013 telah tercukupi dan terdistribusi ke semua sekolah sesuai pesanan, kecuali buku agama (non Islam).</p>
10	<p>Untuk meningkatkan minat baca bagi anak-anak diharapkan peningkatan kualitas dan kuantitas perpustakaan daerah maupun perpustakaan sekolah</p>	<p>Peningkatan minat baca di sekolah dilakukan dengan upaya-upaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan gedung-gedung perpustakaan (jumlah SD se kabupaten Rembang yang belum mempunyai perpustakaan sebanyak 28 SD dari total 374 SD) dan akan dituntaskan pada Tahun 2015. - Penambahan buku-buku perpustakaan. - Gerakan menambah minat baca di sekolah.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
III. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM		
1.	Untuk menunjang kinerja yang lebih baik, mengharapkan adanya pembangunan gedung kantor baru untuk SATPOL PP dan pembangunan gudang dikantor BPBD.	Lihat jawaban pada Fraksi Demokrat.
2.	Pembangunan dermaga untuk pelabuhan tidak dititik beratkan di satu pelabuhan saja misalnya Pelabuhan Kragan dan Sarang yang masih jauh dari yang semestinya.	Pekab Rembang telah merencanakan pembangunan dermaga di beberapa Tempat Pelelangan Ikan diantaranya Dermaga Tasikagung yang telah selesai pembangunannya pada Tahun 2013 dan selanjutnya pada Tahun Anggaran 2015 akan dibangun dermaga di TPI Karanganyar dan TPI Sarang disamping itu secara bertahap akan dilaksanakan rehab dan pembangunan TPI baru guna meningkatkan pelayanan kepada nelayan.
3.	Permasalahan nelayan yang ditahan oleh nelayan setempat yang menganggap telah melanggar batas perairan daerah tangkap ikan dengan permintaan tebusan yang tidak sedikit. Mohon perhatian Pemkab Rembang untuk melindungi warga yang mengalami masalah hukum di daerah lain.	Lihat jawaban pada Fraksi Demokrat.
4.	Langkah yang akan dilakukan Pemkab Rembang dengan berlakunya Undang-Undang tentang Desa.	Langkah-langkah yang sudah kita mulai diantaranya : a. Menyusun draft Rancangan Perda sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Desa yang kami harapkan pada akhir tahun ini sudah bisa mulai pembahasan. b. Pembinaan dan penguatan BPD. c. Mengalokasikan anggaran untuk pemberian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang termuat dalam ADD Tahun 2015. d. Melakukan validasi Kades dan Perangkat Desa se Kabupaten Rembang. e. Melakukan inventarisasi aset desa berupa pendataan tanah kas desa di Kab. Rembang.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
5.	Pengurusan persyaratan program BPJS yang sulit.	<p>Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk rekrutment kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi kewenangan penuh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan persyaratan dan pengurusan kepesertaan JKN ditangani langsung oleh BPJS Kesehatan.</p> <p>Namun akan mengkoordinasikan dengan BPJS Kesehatan agar persyaratan dan pengurusan kepesertaan JKN menjadi lebih mudah dan cepat.</p>
6.	Program Pemkab yang menonjol terkait janji kampanye yang dibiayai APBD Kab. Rembang 2015.	<p>Janji kampanye : Mewujudkan Rembang yang maju, mandiri, dinamis dan sejahtera. Maju artinya jaringan, sarana dan prasarana memadai, pelayanan publik memuaskan, sistem pemerintahan yang akuntabel. Mandiri artinya selalu ada peningkatan proporsi PAD terhadap APBD, dapat memenuhi ketahanan pangan. Dinamis artinya mampu mengikuti perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan politik baik dalam negeri maupun internasional. Sejahtera artinya meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, tercukupinya sandang, pangan, papan serta tingginya religiusitas masyarakat.</p>
7.	Langkah-Langkah untuk penanganan BUMD tahun 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih mengefektifkan Tim Rakor BUMD; 2. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas manajemen ; 3. Meningkatkan pengawasan melalui optimalisasi peran Dewan Pengawas ; 4. Melakukan penambahan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan pelayanan dan peningkatan deviden ; 5. Melakukan audit kinerja oleh Auditor Independen terhadap semua BUMD guna menjamin akuntabilitas.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
IV. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
1	Hambatan pembangunan, sinkronisasi dengan pemerintah propinsi dan pusat, potensi daerah, pilihan strategi dan skala prioritas pembangunan Rembang 2015 agar disajikan dalam nota pengantar.	Terima kasih, akan kami perhatikan
2	Toleransi SILPA 5 %	Secara limitative ketentuan dan toleransi SILPA tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3	Turunnya retribusi daerah dari 32,816 milyar menjadi 25,369 milyar	Terkait dengan turunnya retribusi daerah hal ini disebabkan adanya pengalihan penganggaran dari rekening Retribusi Daerah ke lain-lain PAD yang sah sesuai PP Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP yang ditindaklanjuti dengan Surat Mendagri Nomor 900/2280/SJ bahwa rencana Pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok PAD, Jenis lain-lain PAD, Obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan
4	<p>Struktur APBD:</p> <p>a. Agar ada efisiensi Belanja Pegawai (Acress)</p> <p>b. Belanja Barang Jasa lebih besar dari Belanja Modal</p>	<p>Belanja Pegawai sudah disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada dan penganggarnya sesuai dengan Permendagri nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015.</p> <p>Dalam penganggaran Belanja Barang dan jasa besarnya hampir dua kali lipat belanja modal disebabkan karena didalamnya termasuk belanja barang yang diserahkan pada pihak ke tiga (Hibah/Bansos Barang).</p>

No	PERTANYAAN	JAWABAN
5	Penataan menyeluruh terhadap jalan antar desa ataupun antar antar kecamatan yang menjadi tanggung jawab daerah	Kami sangat menyetujui karena penambahan jalan antar desa dan antar kecamatan dapat segera meningkatkan kelancaran akses antar daerah dan wilayah yang berdampak peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat dan sektor lainnya. Sudah teranggarkan untuk menangani kegiatan tersebut.
6	Insentif untuk guru madrasah diniyah dan guru PAUD	Selama ini telah kami upayakan memberikan Insentif kepada guru MI dan guru PAUD Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
7	Pemerintah Kabupaten Rembang agar bersandar pada konstitusi atas Sengketa Pelabuhan Sluke	Saran akan kami perhatikan.
8	Memfasilitasi kasus penyanderaan kapal nelayan Rembang	Lihat jawaban pada Partai Demokrat

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
V. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
1.	Pekab Rembang selaku pemegang saham mayoritas di PT. RBSJ untuk segera menggelar RUPS.	<p>Terimakasih atas peringatannya. RUPS Tahunan tutup buku 2013 sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menunggu hasil audit kinerja PT RBSJ oleh auditor independent (yang masih dalam proses) yang merupakan temuan BPK R.I sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Rembang Nomor 700/144/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK R.I Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 2. Laporan tahunan RBSJ tahun buku 2013 dari Kantor Akuntan Puulik akan dikonsolidasikan dengan hasil audit kinerja
2.	Pekab Rembang segera membedah segala permasalahan yang ada di Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke terkait dengan keabsahan proses perijinan beserta dokumen yang mendasarinya dan menyalpkan Perda Yang berhubungan dengan operasional pelabuhan.	<p>Terimakasih atas prakarsanya, dan Pekab segera melengkapi segala regulasi yang belum ada sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan serta segala aturan yang berlaku. Perlu kami jelaskan bahwa Pelabuhan Rembang (Terminal Sluke/Tanjung Bonang) merupakan pengembangan Pelabuhan Exiting di Desa Tasikagung Rembang karena berdasarkan hasil survey dari Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2008 Pelabuhan Tasikagung tidak mungkin dikembangkan karena kondisi laut dan wilayah daratannya. Sehingga pengembangannya dialihkan ke Desa Sendang Mulyo Kec. Sluke. Berdasarkan hasil survey Pantai Desa Sendang Mulyo mempunyai prospek menjadi Palabuhan Nasional dan bahkan pelabuhan utama/internasional.</p> <p>Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bonang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 414/2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.</p>

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>Pengoperasionalan pelabuhan Tanjung Bonang dilaksanakan berdasar berdasarkan pada Surat Ijin Sementara dari Menteri Perhubungan RI Nomor PP001/2/12/DJPL.12 tanggal 7 Mei 2013 dan Surat Ijin Sementara dari Dirjen Perhubungan Laut Nomor PP.10/2/5/DP.12 tanggal 10 April 2012 tentang Ijin Operasional Sementara Pelabuhan Rembang.</p> <p>Penyelenggaraan operasional Pelabuhan Rembang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Rembang Kementerian Perhubungan RI.</p>
3.	<p>Implementasi dari PP 43 Tahun 2014 terkait dengan masa jabatan Perangkat Desa haruslah tetap menunggu revisi Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur tentang Perangkat Desa mengingat masih banyak hal-hal yang sifatnya belum teknis.</p>	<p>Dalam ketentuan pasal 157 PP Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini" hal ini berlaku juga termasuk yang mengatur masa jabatan perangkat desa, dimana harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang dan PP No.43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaannya.</p> <p>Menanggapi isi Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 yang belum mengatur secara teknis terutama dalam hal pemilihan Kepala Desa, kita akan menunggu dikeluarkannya Peraturan Menteri sebagaimana disebutkan pada pasal 46 dalam Peraturan Pemerintah ini, sehingga ketika Rancangan Perda kita yang mengatur Pemilihan Kepala Desa di tetapkan, maka segala ketentuan teknis yang belum ada di dalamnya akan dapat kita tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati.</p>
4.	<p>Melihat nilai SILPA yang besar, pihak Eksekutif agar benar-benar serius dalam merencanakan dan konsisten dalam melaksanakan Peraturan daerah APBD mendatang dan bersikap konsisten terhadap apa yang sudah direncanakan.</p>	<p>Terima kasih akan kami perhatikan.</p>

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>VI.FRAKSI KARYA SEJAHTERA</u>	
1	SiLPA pada RAPBD 2015 sangat tinggi ?	<p>SiLPA yang direncanakan sebesar Rp. 97.982.227.000,-</p> <p>Terdapat beberapa komponen SiLPA antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelampauan Penerimaan PAD - Pelampauan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi - Sisa Penghematan Belanja <p>Dengan memperhatikan komponen SiLPA tersebut maka secara makro hasil pelaksanaan kegiatan telah tercapai sehingga terjadi peningkatan kinerja pada beberapa SKPD.</p>
2	Tidak terlaksananya pembangunan TPI Kragan padahal anggaran sudah tersedia ?	<p>Perlu kami jelaskan bahwa yang dimaksud bukan pembangunan TPI Kragan tetapi Pembangunan Dermaga Jetty TPI Kragan, kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2014, disebabkan karena gagal lelang dan waktu yang tersedia tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, mengingat konstruksi tiang pancang yang harus dipesan dulu dan secara keseluruhan diperkirakan tidak selesai pada Tahun Anggaran 2014.</p>
3	Bagaimana proteksi/perlindungan kepada para nelayan ?	Lihat jawaban pada Fraksi Demokrat.
4	Kemana larinya pendapatan bongkar muat terkait pendapatan dari Pelabuhan Umum Nusantara "Tanjung Bonang" ?	<p>Pendapatan pelabuhan di pungut oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Rembang berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku di Kementerian Perhubungan R.I dan selanjutnya Pendapatan tersebut disetor seluruhnya oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Rembang ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara.</p>
5	Bagaimana nasib RBSJ? Sudah RUPS? Bagaimana Devidennya? Selain SPBU usaha apa yang sudah dilakukan?	Lihat jawaban yang telah ada pada Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>VI.FRAKSI KARYA SEJAHTERA</u>	
1	SiLPA pada RAPBD 2015 sangat tinggi ?	SiLPA yang direncanakan sebesar Rp. 97.982.227.000,- Terdapat beberapa komponen SiLPA antara lain : - Pelampauan Penerimaan PAD - Pelampauan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi - Sisa Penghematan Belanja Dengan memperhatikan komponen SiLPA tersebut maka secara makro hasil pelaksanaan kegiatan telah tercapai sehingga terjadi peningkatan kinerja pada beberapa SKPD.
2	Tidak terlaksananya pembangunan TPI Kragan padahal anggaran sudah tersedia ?	Perlu kami jelaskan bahwa yang dimaksud bukan pembangunan TPI Kragan tetapi Pembangunan Dermaga Jetty TP. Kragan, kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2014, disebabkan karena gagal lelang dan waktu yang tersedia tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, mengingat konstruksi tiang pancang yang harus dipesan dulu dan secara keseluruhan diperkirakan tidak selesai pada Tahun Anggaran 2014.
3	Bagaimana proteksi/peilindungan kepada para nelayan ?	Lihat jawaban pada Fraksi Demokrat.
4	Kemana larinya pendapatan bongkar muat terkait pendapatan dari Pelabuhan Umum Nusantara "Tanjung Bonang" ?	Pendapatan pelabuhan di pungut oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Rembang berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku di Kementerian Perhubungan R.I dan selanjutnya Pendapatan tersebut disetor seluruhnya oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Rembang ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara.
5	Bagaimana nasib RBSJ? Sudah RUPS? Bagaimana Devidennya? Selain SPBU usaha apa yang sudah dilakukan?	Lihat jawaban yang telah ada pada Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
6	Kepada SKPD Pembina kepegawaian harus selalu mengawasi kinerja pegawai dilingkungan Pem. Kab Rembang ?	Pemerintah Kabupaten Rembang melalui BKD Kab. Rembang telah melaksanakan pembinaan yang bersifat preventif yaitu dengan menyebarluaskan Peraturan Perundang-Undangan tentang Disiplin PNS (PP Nomor 53 tahun 2010) yang memuat kewajiban dan larangan PNS serta sanksi yang didapatkan apabila tidak melaksanakan kewajiban maupun melakukan pelanggaran.
7	Pelaksanaan proyek pembangun, hendaknya diawasi secara seksama, banyak pekerjaan yang berkualitas rendah atau kurang baik ?	<p>Dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan bidang tugas yang telah diserahkan kepada pengawas berdasarkan Tupoksi. Lingkup kerjanya yaitu meliputi pengawasan pekerjaan rekanan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan kontrak kerja pekerjaan antara Pengguna Anggaran dan Pihak ketiga/rekanan.</p> <p>Secara umum pengawasan di lingkungan SKPD telah dilaksanakan tugasnya sesuai kewenangannya. Ke depan pengawasan pekerjaan akan lebih kami tingkatkan dan dilaksanakan lebih baik.</p>
8	Timbangan tonase kendaraan agar dipasang untuk menjaga kualitas jalan ?	<p>Kami telah melakukan pemantauan tonase muatan mineral bukan logam dan batuan dengan penentuan lokasi yang akan dijadikan pemasangan timbangan yaitu di : Desa Wonorekto dan Desa Gading Kec. Sale.</p> <p>Sedangkan tindakan yang telah ditempuh dengan melakukan kerjasama sewa lahan pada PT. KAI dan Pemerintah Desa Gading Kec. Sale.</p>

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
VII. FRAKSI HARAPAN		
1.	Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar dialokasikan anggaran untuk pendampingan dari sisi teknis, administrasi dan hukum untuk menjaga agar program berjalan efektif dan efisien.	Kami telah merencanakan dalam RAPBD 2015 berupa sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap Perangkat Desa.
2.	Kantor Satpol PP sampai saat ini masih berstatus pinjam pakai agar dia'okasikan anggaran untuk pembangunan Kantor Satpol PP.	Lihat jawaban pada Fraksi Demokrat.
3.	Meminta kepada SKPD dan Komisi terkait mencermati dan membahas secara mendetail terkait dengan Retribusi Daerah dan Alokasi Bantuan Sosial Sosial bagi Nelayan.	Kami sependapat untuk Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang segera dibahas karena akan digunakan sebagai acuan dalam perhitungan target retribusi TPI sekaligus perubahan mekanisme penganggaran Bansos nelayan yang semula lewat APBD kedepan langsung dikelola oleh nelayan
4.	Mengusulkan alokasi pembangunan Gudang penyimpanan alat-alat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Terima kasih akan kami perhatikan.
5.	Perlunya disusun perencanaan program pendidikan yang komprehensif terkait dengan peningkatan kualitas guru, infrastruktur pendidikan dan memperkuat pendidikan informal dan non formal.	Terima kasih akan kami perhatikan.
6.	Perlu dialokasikan anggaran untuk ODHA, (Orang Dengan HIV/AIDS) dan korban kekerasan seksual.	Terima kasih akan kami perhatikan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
7.	<p>Terlaksananya Program Kartu Indonesia Sehat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program BPJS agar SKPD terkait segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Rembang akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan hasilnya akan dikoordinasikan dengan BPJS</p>
8	<p>Dalam penyusunan APBD agar pemerintah daerah menyusun rencana kebutuhan computer, lap top dan note book di masing-masing SKPD sesuai dengan beban kerja.</p>	<p>Setiap tahun anggaran telah disusun rencana kebutuhan sarana prasarana dari masing-masing SKPD dengan menetapkan RKBD (Rencana Kebutuhan Barang Daerah) dan RKPBB (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang) sehingga apabila dalam rencana penyusunan RKA SKPD ada pengadaan computer, laptop dan note book telah disesuaikan dengan rencana kebutuhan tersebut.</p>

Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pengantar Nota Keuangan RAPERDA Tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan komisi-komisi.

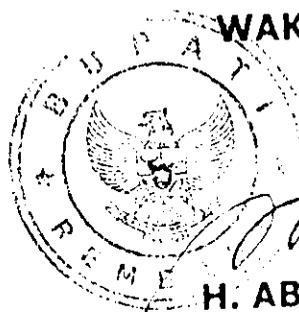
Demikian saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 12 November 2014

Plt. BUPATI REMBANG

WAKIL BUPATI



H. ABDUL HAFIDZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (III)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

Hari : JUM' AT
Tanggal : 28 November 2014
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Pengesahan Rancangan Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2015;
 3. Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015;
 4. Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015;
 5. Persetujuan Penetapan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015;
 6. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015;
 7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL, MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 6 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 5 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 4 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 7 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 5 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 5 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 4 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 41 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 3 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : - orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 1 orang |

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: - orang
5. Fraksi Gerindra	: - orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 4 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL, MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat Plt. Bupati Rembang
- Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badar., Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan
semua undangan lain yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah yang telah memberi kita hidayah, ni'mah dan rahmah sehingga kita masih diberi kesempatan dapat melaksanakan tugas mengikuti Rapat Paripurna

Ketiga (III) DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dengan keadaan sehat walafiat.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Perlu diketahui bahwa Rapat Paripurna pada hari ini merupakan Rapat Paripurna terakhir dalam membahas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, sebagaimana terjadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang tanggal 27 Oktober 2014. Di mana dalam pembahasannya, dilalui dengan beberapa tahapan yang semua itu dilakukan untuk menetapkan dan memutuskan arah Kebijakan Daerah Kabupaten Rembang dalam menentukan posisi Anggaran Daerah yang efisien dan efektif sehingga dapat mencakup kepentingan Aparatur maupun Kepentingan Publik demi terwujudnya Masyarakat Kabupaten Rembang ke depan yang lebih baik.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Perlu kami sampaikan sebelumnya, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 13 dan Pasal 14 dijelaskan bahawa ” **Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, dimana penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda dan hasilnya disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD**”. Merujuk hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui surat Plt. Bupati Rembang Nomor : 188.3/3072/2014 tanggal 26 November 2014 telah

mengirimkan Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2015 kepada DPRD Kabupaten Rembang, Komisi C DPRD dengan usulan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rembang. Oleh Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang hal tersebut ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat penyusunan Prolegda bersama Tim Prolegda Pemerintah Kabupaten Rembang pada tanggal 26 dan 27 November 2014.

Dari pelaksanaan rapat dihasilkan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2015 sebagaimana fotocopy yang berada di tangan Saudara-saudara anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna ini. Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka terdapat ada 2 (dua) agenda pokok dalam rapat paripurna ini yakni **“Pengesahan Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2015 dan Persetujuan Penetapan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2015.** Untuk selengkapnya akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Pengesahan Rancangan Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2015;
3. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
4. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
5. Persetujuan Penetapan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 ;
6. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa Rapat Paripurna untuk **menetapkan APBD** dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Sementara itu, menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak orang. Dengan demikian rapat paripurna ini telah memenuhi kuorum, dan dapat kita mulai.

Dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 10.30 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang terhormat,

Selanjutnya marilah kita ikuti acara yang kedua, yaitu Pengesahan Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2015. Sebagaimana telah saya kemukakan di depan bahwa hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Untuk itu Rancangan Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2015 yang foto copynya berada ditangan saudara-saudara anggota DPRD, akan saya mintakan persetujuan untuk keabsahannya dalam rapat paripurna ini.

“ Apakah Rancangan Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2015 dapat disetujui dan disahkan menjadi Prolegda Tahun 2015 ?”

===== SETUJUUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Terima kasih. Selanjutnya Rancangan Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2015 yang telah disetujui ini akan ditetapkan menjadi Prolegda Kabupaten Rembang Tahun 2015 dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara yang ketiga, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2015. Untuk itu Kepada Sekretaris Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang *Sdr. Drs. Achmad Muulif* dipersilahkan.

===== LAPORAN BADAN ANGGARAN =====

➤ *(Laporan Badan Anggaran atas hasil Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang terlampir)*

Terima kasih kepada Sekretaris Badan Anggaran atas penyampaian laporannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Menginjak acara keempat yaitu Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015. Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi yang akan menyampaikan

Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, saya persilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Zaimul Umani NS
2. Fraksi Demokrat : Sdri. Imro'atus Sholichah,
SE. MH
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Widodo
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Sdr. H. Chasanuddin
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. Gatot Paeran, SH.MSi
7. Fraksi Harapan : Sdri. Sahningsih, SE

Selanjutnya dimulai dari juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sampai dengan Fraksi Harapan, secara berurutan di persilahkan untuk menyampaikan pendapat akhirnya. *Dipersilahkan.*

Nama Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	√		
Fraksi Demokrat	√		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	√		
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	√		
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	√		
Fraksi Karya Sejahtera	√		
Fraksi Harapan	√		

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya masing-masing.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuk acara berikutnya yaitu agenda pokok Persetujuan Penetapan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 . Oleh karena moment ini sangatlah menentukan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Rembang setahun ke depan, kami berharap kepada seluruh anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna ini untuk lebih fokus dalam memberikan tanggapan dalam acara pokok ini, karena semuanya dimulai dari pengambilan keputusan saudara-saudara dalam memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Saya tawarkan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna hari ini :

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dan Rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD melalui Laporannya dapat disetujui ?”

=====S e t u j u u u ! ! !=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD meryetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Selanjutnya kita masuki acara terakhir yaitu Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Kepada saudara Plt. Bupati dipersilahkan. (*H. Abdul Hafidz*)

=====*PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI*=====

- (*Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 terlampir*)
- Tambahan Jawaban Plt. Bupati atas pertanyaan Fraksi Karya Sejahtera tentang pengelolaan pendapatan Pelabuhan Tanjung Bonang pada rapat paripurna tanggal 12 November 2014.
“ Ada yang perlu kami klarifikasi atas pandangan dari Fraksi Karya Sejahtera, jawaban saya kemarin itu menjelaskan pada proses yang jelas –jelas keabsahannya ada. Jadi saya tidak menyebut PRK itu apa, tetapi didalam pelabuhan itu ada regulasi yang mengatur yaitu UU Nomer 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kemudian PP Nomer 1 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan yang berwenang mengelola pelabuhanan yang belum diusahakan seperti ini itu adalah Kepala Unit Pengelola, kemudian kami tidak boleh melegalisasi sesuatu yang tidak jelas. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa pelabuhan ini memang butuh waktu penyelesaian persyaratan- persyaratan legalisasinya ini baru tahap –tahap proses. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian jawaban kami adalah berdasarkan yang sudah jelas, yang punya kewenangan, yang diatur undang-undang dan lembaga- lembaga itu jawabanya. Kemudian PRK menjawab bahwa ada penghasilan sebesar Rp 22 miliar yang

digunakan untuk reklamasi itu urusan mereka sebagai pihak yang punya beban untuk mereklamasi pelabuhan yang ada itu, jadi kami tidak melihat itu. Jadi inilah kita terjadi “ miss komunikasi “ jadi saya mohon maaf bilamana itu dianggap sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dibahas oleh Komisi B. Saya kira itu dari saya mudah – mudahan menjadikan maklum. Sekali lagi pelabuhan itu perlu proses penyelesaian tentang perijinan- perijinan dan itu perlu waktu yang cukup panjang. Jadi yang kami lakukan selama ini sesuai dengan peraturan yang ada. Kami dan DPRD tentu bersama-sama akan menyelesaikan bila di pelabuhan itu terjadi masalah.” Terima Kasih.

Terima kasih kepada saudara Plt. Bupati Rembang, yang telah menyampaikan “ *Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015* ”.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara telah kita lalui bersama, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini, terima kasih saya sampaikan kepada Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota DPRD baik yang masuk dalam Komisi-Komisi maupun Badan Anggaran serta Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga dapat menyelesaikan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2015 sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

Dan kepada saudara-saudara yang telah mengikuti Rapat , kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak terima kasih atas segala

perhatian, kehadiran serta kebersamaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sebelum menutup rapat, saya mengingatkan kepada Saudara-saudara bahwa kegiatan DPRD setelah ini adalah pelaksanaan Reses pada tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2014, dan pada tanggal 3 Desember 2014 diagendakan rapat paripurna pelapcran hasil akhir dilanjutkan dengan general Chek Up. Untuk itu kepada Anggota DPRD dimohon kehadirannya pada acara tersebut.

Selanjutnya dengan mengucapkan “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 11. 55 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

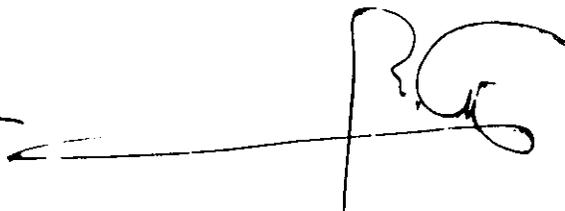
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A



H. MAJID KAMIL. MZ

SEKRETARIS



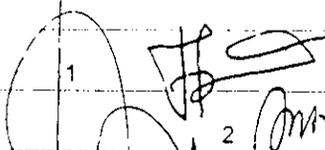
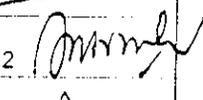
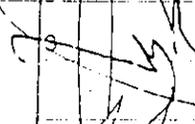
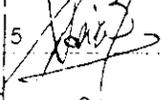
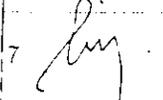
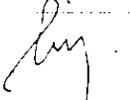
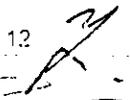
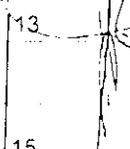
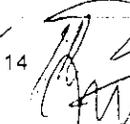
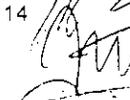
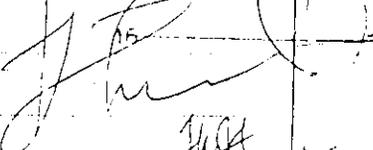
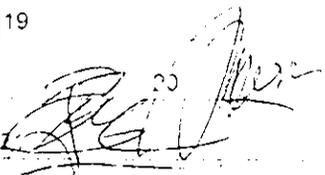
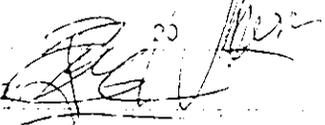
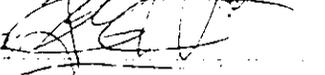
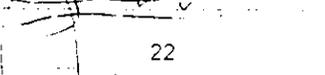
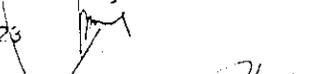
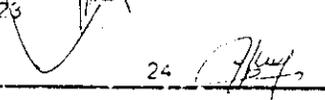
Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utana Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Rancangan Prolegda Kabupater Rembang Tahun 2015;
- LAMPIRAN III : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
- LAMPIRAN VI : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMBAHASAN RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015
HARI/TANGGAL : JUMAT, 28 NOPEMBER 2014
PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANCUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota		
4	ZAIMUL UMAMANS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETIARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMA WATI	Anggota		
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota		
16	H. ISLAHIDDIN	Anggota		
17	H. HAKNO, SE	Anggota		
18	MUGIYARTO, ST	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOHIL LAQUE	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRAN	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, BA	Anggota		
23	WASIMAN	Anggota		
24	MUHAMMAD ASSAWI, S.Pd	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	RIDWAN, SU, MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SU, MM	Anggota	30	
31	FRIDA ARIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, SPI	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDI AH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KABYA SECAHTERA				
38	H. ISMARI	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SU, MS	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SU	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
42	H. M. NURHASAN, SU, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	
SEKRETARIAT DPRD				
46	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris DPRD	46	
47	Drs. LATOIFUL MINAN	Kablag. Keuangan	47	
48	GATOT DARYANTO, SU	Kablag. Umum	48	
49	RATRIADI SAPTEKO, SU	Kasubag. Rapat & Risalah	49	
50	JOKO PRYONO, SE	Kasubag. Perbendaharaan	50	
51	BAMBANG B.S, SH	Kasubag. Humas&Protokel	51	
52			52	
53			53	
54			54	
55			55	

eterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Diras Luar



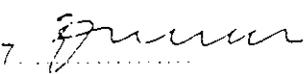
DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA

H. MAJID KAMIL MZ

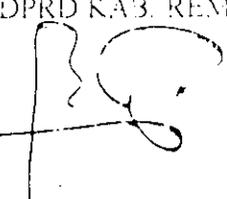
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR
 RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL: JUMAT, 28 NOPEMBER 2014
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Plt. Bupati Rembang	1. 
2	Kejaksaan Negeri Rembang	2.
3	Pengadilan Negeri Rembang	3.
4	Mustamir	Dandim 0720 Rembang	4. 
5	Kepolisian Resort Rembar g	5.
6	Pengadilan Agama Kab. Rembang	6.
7	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	7. 

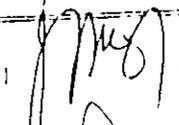
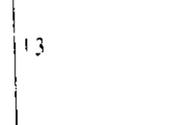
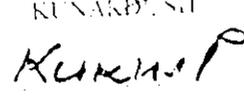
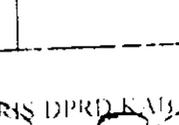
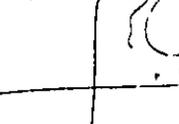
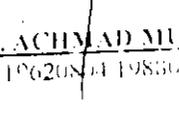
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

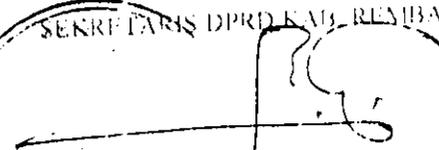
Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR
KAPAL PARTISIPAN 101 DPRD KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL: JUMAT, 28 NOPEMBER 2013
 PUKUL: 09.30 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. AGUS SALIM, SH, MH	
2	CAMAT KALIORI	Drs H. MUSTHOLIH	
3	CAMAT SUMBER	Drs HERIYONO	
4	CAMAT SULANG	Retno G.	
5	CAMAT BULU	SUSWANTORO, SE	
6	CAMAT PAMOTAN	M. WIYOTO, SE	
7	CAMAT GUNEM	H. G. H. GUSAWARMA, SS	
8	CAMAT SALI	KUNARDI, SH	
9	CAMAT LASI		
10	CAMAT PANCUR	SUPARTO, SH	
11	CAMAT SEDAN	H. WAHYU OETOMO, SH	
12	CAMAT SLUKE	H. MARDIYANTO, SE, SP	
13	CAMAT KRAGAN	MASHAM, S Pd	
14	CAMAT SARANG	EDY RISWANTO, SH, M Si	

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REMBANG

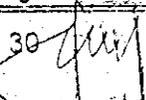
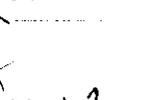
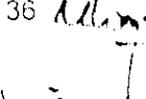
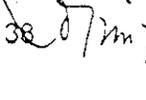
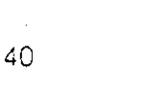
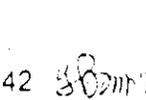
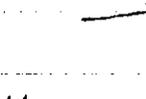


Drs. ACHMAD MUALLIH
 NIP. 19620804198303 1 011

**DAFTAR HADIR TAMU BUDANGSA
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN**

HARI/TANGGAL: JUMAT, 28 NOPEMBER 2014
WILKUL 10 30 WIB

NO	NAMA BAG. / ORGANISASI	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2			
1	STAF AHLI BUPATI			
2	STAF AHLI BUPATI			
3	STAF AHLI BUPATI			
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	A. FANTASIA	B. III	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Aleksandra	Bag. Tata	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	JOHANNA NW	Bag. Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Extrakt		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Sulhan	Bag. Ekonomi	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Haryanti	Bag.	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Endi Suharnati	ORNS	15
16	BAG. UMUM			16
17	DPPKAD	M. N. N.	PPRC	17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA	Hani S	ka	19
20	BPMPKB	AGATINI	sekret	20
21	BKD	SUPARMIN		21
22	BKP & PAK	W. N. N.	sekret	22
23	R. P. B. D.			23
24	DINAS PERKERJAAN UMUM	FAHRIZ	Harbi	24
25	DINAS KESEHATAN	Cupriyo	sekret	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Widi S.	Kasi Dik	26
27	DINPERINDAGKOP & UKM	BOY SUKUNO	KASU	27
28	DINTANHUT	Surat Nini		28
29	DINLUKAT	BUDIYONO	sekretaris	29

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINHUBKOMINFO	Suryono	Ka. Bina	30 
31	DINAS DUKCAPIL	M. Dwiwidi	Ka. Bina	31 
32	DINSOSNAKERTRANS	H. WALUYO	KADIN	32 
33	DINBUDPARPORA	SURYAWATI	Setu	33 
34	DINAS ENERGI & SDM			34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Purwati Sumi	ka	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	ka	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR PPT	St. Sugianti	Ka. KPPT	38 
39	RSUD dr. R. SUTRAGNO			39 
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M	SUSWAKHID HIDAYAT	DIF.	42 
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	Muhsin		50 
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBOHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62

NO	NAMA	TANDA TANGGA	5
63	UPCAD (ASET DOKUMEN)		
64	KANTOR PEL. IBUMAN		84
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG		
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG		
67	PELAKSANAAN PERKAWANAN 17 AGUNG		85
68	BTPN KUP. REMBANG		
69	PERUM PEGADAIAN	69	
70	BSM. BANK DANAMON		70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN	71	
72	GERAKAN PRAMUKA		72
73	PMI CAB. REMBANG	73	
74	STIE. YPPI REMBANG		74
75	DPC PPP	75	
76	DPC PARTAI DEMOKRAT		76
77	DPD PARTAI GOLKAR	77	
78	DPD PAN		78
79	DPC PARTAI HANURA	79	
80	DPC PKS		80
81	DPC PARTAI NASDEM	81	
82	DPC PARTAI GERINDRA		82
83	DPC PKE	83	
84	DPC PDI PERJUANGAN		84
85	SUARA MERDEKA	85	
86	CAKRA TV		86
87	RADIO CBPM	87	
88	RADIO R2B		88
89	MAJALAH BANGKIT	89	
90	PATI EKSPRESS		90
91	RADIO MATA AIR	91	
92	MIMBAR RAKYAT		92
93	CARAKA CANDI	93	
94	KEDAULATAN RAKYAT		94
95		95	

Wartawan

T.A. FICS

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	PEJABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Agus Modan	Agus		96 
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 SETWAN
 Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
**Jl. Djonegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos
59282**
R E M B A N G

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) beserta pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Program Legislasi Daerah disusun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Program Legislasi Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Program Legislasi Daerah sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 28 November 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



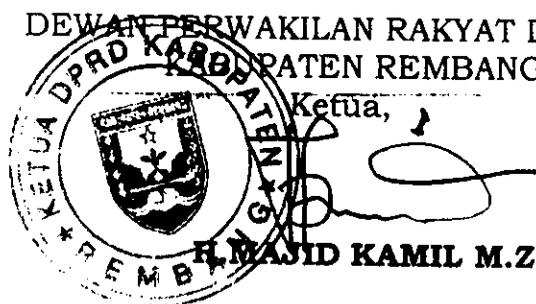
Lampiran : Keputusan DPRD Nomor 13 Tahun 2014
Tentang Program Legeslasi Daerah
Tahun 2015

Rancangan Program Legislasi Daerah Tahun 2015.

1. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
2. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
3. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
4. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu ;
5. Raperda tentang Penanaman Modal Daerah ;
6. Raperda tentang Pencabutan Raperda Retribusi Izin Bidang Kesehatan ;
7. Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah .

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 28 November 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



H. RAJID KAMIL M.Z



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 591194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 14 TAHUN 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

- Membaca : Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 menjadi Peraturan Daerah ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Daerah ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
37. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
40. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 ;
42. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :
1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 28 November 2014.
 2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 28 November 2014.
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 28 November 2014.

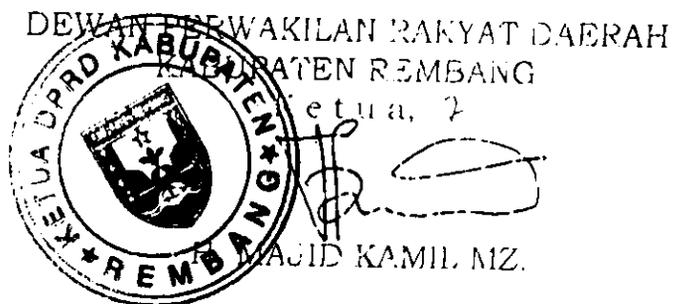
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. RANCANGAN : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum
PERTAMA Keputusan ini kepada Fit. Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 November 2014



LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD
KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 28 November 2014



TENTANG

RAPERDA APBD
KABUPATEN REMBANG T.A 2015

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. Diponegoro No. 33 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

I. PENDAHULUAN :

1. bahwa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bahwa hasil pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. D A S A R.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
8. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 3 November 2014 Nomor 019.6/544/2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

9. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 3 November 2014 Nomor 019.6/545/2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Surat Plt. Bupati Rembang Nomor 188.3/2916/2014 tanggal 7 November 2014 dengan perihal Pengiriman Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
11. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 27 Oktober 2014 yang mengagendakan Jadwal Rapat-rapat DPRD dalam membahas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 November 2014 Jam 13.00.WIB. dengan agenda penjelasan lanjutan atas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.
- b. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014 Jam 13.00.WIB, dalam rangka membahas Strategi dan distribusi Pembahasan atas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.
- c. Rapat – rapat Komisi A,B,C,D DPRD dengan SKPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :
 - H a r i : Jum'at s/d Senin.
 - Tanggal : 14 s/d 24 November 2014.
 - Jam : 09.00 WIB.
 - Tempat : Ruang Komisi A,B,C dan D DPRD Kabupaten Rembang.
 - Acara : Pembahasan Pendalaman Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.
- d. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD pada .
 - H a r i : Selasa
 - Tanggal : 25 November 2014.
 - Jam : 09.00. WIB.
 - Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.
 - Acara : Penyampaian Laporan Komisi atas Pendalaman Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

e. Rapat Internal Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang :

H a r i : Selasa

Tanggal : 25 November 2014.

Jam : 13.00. WIB.

Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.

Acara : Pembahasan atas Laporan Komisi terhadap Pendalaman Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

f. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :

H a r i : Kamis

Tanggal : 27 November 2014.

Jam : 09.00. WIB.

Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.

Acara : Sinkronisasi dan Koordinasi Hasil Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. RINGKASAN RANCANGAN APBD 2015

NO	SKPD	PEMBAHASAN		
		JUMLAH (Rp)	PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5= 4-3
1	PENDAPATAN DAERAH	1.289.108.300.640	1.293.964.533.640	4.856.233.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	178.304.966.000	182.191.199.000	3.856.233.000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	36.203.000.000	36.338.000.000	135.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.369.244.000	29.090.477.000	3.721.233.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.404.000.000	6.404.000.000	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.358.722.000	110.358.722.000	-
1.2	Dana Perimbangan	819.451.224.000	819.451.224.000	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.733.137.000	27.733.137.000	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	723.091.447.000	723.091.447.000	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	68.626.640.000	68.626.640.000	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	291.322.110.640	292.322.110.640	1.000.000.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.492.290.000	1.492.290.000	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	61.172.513.000	62.172.513.000	1.000.000.000
1.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	228.657.307.640	228.657.307.640	-
2.	BELANJA DAERAH	1.384.781.527.640	1.481.899.399.672	97.117.872.032
2.1	Belanja Tidak Langsung	888.012.208.361	931.188.871.761	43.176.603.400
2.1.1	Belanja Pegawai	720.090.982.050	756.267.792.650	36.176.810.600
2.1.2	Belanja Bunga	37.000.000	37.000.000	-
2.1.4	Belanja Hibah	37.178.760.200	46.151.753.000	8.972.992.800
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.335.200.000	4.130.000.000	(1.203.200.000)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	-	6.157.224.400	6.157.224.400
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	124.372.326.111	117.445.101.711	(6.927.224.400)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	-

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	PEMBAHASAN	
		R APBD 2015	PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5= 4-3
2.2	Belanja Langsung	496.769.259.279	550.710.527.911	53.941.268.632
2.2.1	Belanja Pegawai	107.762.054.600	107.596.484.200	(165.570.400)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242.888.100.200	267.985.030.600	25.096.930.400
2.2.3	Belanja Modal	146.119.104.479	175.129.013.111	29.009.908.632
	Jumlah Belanja	1.384.781.527.640	1.481.899.399.672	97.117.872.032
	surplus (devisit)	(95.673.227.000)	(187.934.866.032)	-(92.261.639.032)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	97.982.227.000	190.243.866.032	92.261.639.032
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	97.982.227.000	190.243.866.032	92.261.639.032
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	97.982.227.000	190.243.866.032	92.261.639.032
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.309.000.000	2.309.000.000	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.254.000.000	2.254.000.000	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	55.000.000	55.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.309.000.000	2.309.000.000	-
	Pembiayaan Netto	95.673.227.000	187.934.866.032	92.261.639.032
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			

B. REKAPITULASI ANGGARAN SKPD RANCANGAN APBD 2015

NO.	SKPD	JUMLAH R APBD 2015			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN		508.333.511.000	48.188.924.000	556.522.435.000
2	DINAS KESEHATAN	28.919.373.000	37.425.961.000	39.434.367.000	76.860.328.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	77.000.000.000	22.903.855.000	78.551.259.000	101.455.114.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.755.000.000	13.674.392.000	131.822.225.800	145.496.617.800
5	BAPPEDA		3.195.057.000	7.401.792.800	10.596.849.800
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.543.854.000	5.082.964.000	4.120.706.000	9.203.670.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		2.295.381.000	3.149.324.200	5.444.705.200
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2.547.527.000	2.831.870.800	5.379.397.800
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		8.276.245.000	6.859.959.000	15.136.204.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		4.883.581.000	2.427.569.000	7.311.150.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2.401.100.000	8.245.380.000	10.108.326.800	18.353.706.800
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.328.576.000	3.317.364.800	4.645.940.800
13	SATPOL PP		3.213.519.000	1.765.188.000	4.978.707.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.833.286.000	5.230.100.000	7.063.386.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		8.885.583.000	-	8.885.583.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		575.948.000	-	575.948.000
17	SETDA	2.553.500.000	12.052.922.000	27.196.611.079	39.249.533.079
a	SETDA (BAGIAN KEMASYARAKATAN)	21.000.000	-	8.510.000.000	8.510.000.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)		-	795.000.000	795.000.000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	90.000.000	12.052.922.000	4.198.972.600	16.251.894.600
d	SETDA (BAGIAN UMUM)		-	5.086.125.000	5.086.125.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	42.500.000	-	1.141.000.000	1.141.000.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)		-	3.215.000.000	3.215.000.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)		-	1.337.500.000	1.337.500.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	2.400.000.000	-	1.863.013.479	1.863.013.479
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)		-	1.050.000.000	1.050.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD		3.256.635.000	17.459.052.400	20.715.687.400
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.160.276.334.640	182.351.045.361	11.196.983.100	193.548.028.461
a	(SKPD)	49.503.000.000	14.429.759.050	11.196.983.100	25.626.742.150
b	(PPKD)	1.110.773.334.640	167.921.286.311	-	167.921.286.311
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.264.311.000	4.840.800.000	8.105.111.000
21	BKD		3.050.241.000	4.530.710.000	7.580.951.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.230.011.000	1.281.820.000	2.511.831.000
23	KECAMATAN REMBANG		4.809.537.000	432.725.600	5.242.262.600
24	KECAMATAN KALIORI		1.915.149.000	419.772.400	2.334.921.400
25	KECAMATAN SULANG		1.605.141.000	453.447.600	2.058.588.600
26	KECAMATAN SUMBER		1.609.020.000	374.180.000	1.983.200.000
27	KECAMATAN BULU		1.411.847.000	312.993.000	1.724.840.000
28	KECAMATAN LASEM		1.800.224.000	334.327.600	2.134.551.600
29	KECAMATAN PANCUR		2.010.363.000	318.783.000	2.329.146.000
30	KECAMATAN SLUKE		1.439.477.000	332.914.000	1.772.391.000
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.478.787.000	354.302.000	1.833.089.000
32	KECAMATAN GUNEM		1.466.542.000	307.921.000	1.774.463.000
33	KECAMATAN SALE		1.391.351.000	373.895.000	1.765.246.000
34	KECAMATAN KRAGAN		1.857.996.000	404.290.200	2.262.286.200
35	KECAMATAN SEDAN		1.597.558.000	509.335.000	2.106.893.000
36	KECAMATAN SARANG		1.711.856.000	296.120.000	2.007.976.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7.849.345.000	4.532.074.200	12.381.419.200
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1.796.268.000	1.331.507.000	3.127.775.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	133.472.000	6.014.584.000	29.538.132.000	35.552.716.000
40	DINAS ESDM		2.157.456.000	9.101.880.300	11.259.336.300
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.048.000.000	2.488.415.000	5.804.653.000	8.293.068.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.477.667.000	3.695.441.000	29.521.052.600	33.216.493.600
	JUMLAH	1.289.108.300.640	888.012.288.361	496.769.259.279	1.384.781.527.640

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD RANCANGAI

NO.	SKPD	PEMBAHASAN PERSETUJUAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	8	9	10	11=9+10
1	DINAS PENDIDIKAN		544.319.021.600	71.985.391.000	616.304.412.600
2	DINAS KESEHATAN	31.219.373.000	37.425.961.000	41.284.367.000	78.710.328.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	77.000.000.000	22.903.855.000	83.614.703.562	106.518.558.562
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.255.000.000	13.674.392.000	151.201.368.270	164.875.760.270
5	BAPPEDA		3.195.057.000	6.801.792.800	9.996.849.800
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.643.854.000	5.082.964.000	3.870.706.000	8.953.670.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		2.295.381.000	3.249.324.200	5.544.705.200
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2.547.527.000	2.628.770.800	5.176.297.800
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		8.276.245.000	6.740.959.000	15.017.204.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		4.883.581.000	2.332.569.000	7.216.150.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2.700.000.000	8.245.380.000	7.577.206.800	15.822.586.800
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.328.576.000	3.292.364.800	4.620.940.800
13	SATPOL PP		3.213.519.000	1.695.188.000	4.908.707.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.833.286.000	4.830.100.000	6.663.386.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		8.885.563.000	-	8.885.563.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		775.948.000	-	775.948.000
17	SETDA	2.553.500.000	12.052.922.000	25.746.611.079	37.799.533.079
a	SETDA (BAGIAN KEMASYARAKATAN)	21.000.000	-	8.310.000.000	8.310.000.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)		-	695.000.000	695.000.000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	90.000.000	12.052.922.000	3.998.972.600	16.051.894.600
d	SETDA (BAGIAN UMUM)		-	4.586.125.000	4.586.125.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	42.500.000	-	1.041.000.000	1.041.000.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)		-	3.115.000.000	3.115.000.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)		-	1.237.500.000	1.237.500.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	2.400.000.000	-	1.763.013.479	1.763.013.479
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)		-	1.000.000.000	1.000.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD		3.306.135.000	18.961.875.000	22.268.010.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.161.411.334.640	189.350.838.161	12.046.983.100	201.397.821.261
a	(SKPD)	49.638.000.000	14.429.759.050	12.046.983.100	26.476.742.150
b	(PPKD)	1.111.773.334.640	174.921.079.111	-	174.921.079.111
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.206.111.000	4.799.000.000	8.005.111.000
21	BKD		3.050.241.000	4.780.710.000	7.830.951.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.230.011.000	1.131.820.000	2.361.831.000
23	KECAMATAN REMBANG		4.809.537.000	967.725.600	5.767.262.600
24	KECAMATAN KALIORI		1.915.149.000	419.772.400	2.334.921.400
25	KECAMATAN SULANG		1.605.141.000	553.447.600	2.158.588.600
26	KECAMATAN SUMBER		1.609.020.000	374.180.000	1.983.200.000
27	KECAMATAN BULU		1.411.847.000	412.993.000	1.824.840.000
28	KECAMATAN LASEM		1.800.224.000	334.327.600	2.134.551.600
29	KECAMATAN PANCUR		2.010.363.000	468.783.000	2.479.146.000
30	KECAMATAN SLUKE		1.439.477.000	432.914.000	1.872.391.000
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.478.787.000	354.302.000	1.833.089.000
32	KECAMATAN GUNEM		1.466.542.000	407.921.000	1.874.463.000
33	KECAMATAN SALE		1.391.351.000	433.895.000	1.825.246.000
34	KECAMATAN KRAGAN		1.857.996.000	604.290.200	2.462.286.200
35	KECAMATAN SEDAN		1.597.558.000	659.335.000	2.256.893.000
36	KECAMATAN SARANG		1.711.856.000	296.120.000	2.007.976.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7.849.345.000	4.542.074.200	12.391.419.200
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1.796.268.000	1.331.507.000	3.127.775.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	133.472.000	6.014.584.000	31.177.132.000	37.191.716.000
40	DINAS ESDM		2.157.456.000	11.702.292.300	13.859.748.300
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.048.000.000	2.488.415.000	6.454.653.000	8.943.068.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.000.000.000	3.695.441.000	30.221.052.600	33.916.493.600
	JUMLAH	1.293.964.533.640	931.188.871.761	550.710.527.911	1.481.899.399.672

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD RANCANGAI

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
1	2	12=8-4	13=9-5	14=10-6	15=13+14
1	DINAS PENDIDIKAN	-	35.985.510.600	23.796.467.000	59.781.977.600
2	DINAS KESEHATAN	2.300.000.000	-	1.850.000.000	1.850.000.000
3	IGHD dr R. SOETRASNO	-	-	5.063.444.562	5.063.444.562
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	500.000.000	-	19.379.142.470	19.379.142.470
5	BAPPEDA	-	-	(600.000.000)	(600.000.000)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000	-	(250.000.000)	(250.000.000)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	100.000.000	100.000.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	(203.100.000)	(203.100.000)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	(119.000.000)	(119.000.000)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	(95.000.000)	(95.000.000)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	298.900.000	-	(2.531.120.000)	(2.531.120.000)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	(25.000.000)	(25.000.000)
13	SATPOL PP	-	-	(70.000.000)	(70.000.000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	(400.000.000)	(400.000.000)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	200.000.000	-	200.000.000
17	SETDA	-	-	(1.450.000.000)	(1.450.000.000)
a	SETDA (BAGIAN KEMASYARAKATAN)	-	-	(200.000.000)	(200.000.000)
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	(100.000.000)	(100.000.000)
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	-	(200.000.000)	(200.000.000)
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	(500.000.000)	(500.000.000)
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	(100.000.000)	(100.000.000)
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	(100.000.000)	(100.000.000)
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	(100.000.000)	(100.000.000)
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	(100.000.000)	(100.000.000)
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	(50.000.000)	(50.000.000)
18	SEKRETARIAT DPRD	-	49.500.000	1.502.822.600	1.552.322.600
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	1.135.000.000	6.999.792.800	850.000.000	7.849.792.800
a	(SKPD)	135.000.000	-	850.000.000	850.000.000
b	(IPKD)	1.000.000.000	6.999.792.800	-	6.999.792.800
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(58.200.000)	(41.800.000)	(100.000.000)
21	BKD	-	-	250.000.000	250.000.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	-	(150.000.000)	(150.000.000)
23	KECAMATAN REMBANG	-	-	525.000.000	525.000.000
24	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-
25	KECAMATAN SULANG	-	-	100.000.000	100.000.000
26	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-
27	KECAMATAN BULU	-	-	100.000.000	100.000.000
28	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-
29	KECAMATAN PANCUR	-	-	150.000.000	150.000.000
30	KECAMATAN SLUKE	-	-	100.000.000	100.000.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-
32	KECAMATAN GUNEM	-	-	100.000.000	100.000.000
33	KECAMATAN SALE	-	-	60.000.000	60.000.000
34	KECAMATAN KRAGAN	-	-	200.000.000	200.000.000
35	KECAMATAN SEDAN	-	-	150.000.000	150.000.000
36	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	-	10.000.000	10.000.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	-	-	-
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	-	1.639.000.000	1.639.000.000
40	DINAS ESDM	-	-	2.600.412.000	2.600.412.000
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	650.000.000	650.000.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	522.333.000	-	700.000.000	700.000.000
	JUMLAH	4.856.233.000	43.176.603.400	53.941.268.632	97.117.872.032

C. REKOMENDASI

1. Untuk meningkatkan sektor pendapatan pada Badan Lingkungan Hidup perlu dibentuk UPT Badan Lingkungan Hidup.
2. Mohon untuk Pengelolaan sampah yang ada di DPU untuk dapat dipindahkan ke Badan Lingkungan Hidup.
3. Untuk Gudang Logistik BPBD sebesar Rp. 800.000.000,- agar dianggarkan di APBD Perubahan Tahun 2015 sesuai Rekomendasi BPK RI. -
4. Dengan Kenaikan Pendapatan Dinas Kesehatan yang akan digunakan untuk pembangunan Lab. Kesda dan dalam rangka untuk meningkatkan PAD, agar ada perubahan terhadap Perda tentang Tarif Retribusi Kesehatan.
5. Perlu ada Tindak lanjut terkait keterangan Direktur PRK, RBSJ, SKPD terkait, para Investor, UPT tentang pelaksanaan Pengelolaan Pelabuhan Tanjung'Bonang.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Pembahasan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Rembang, 28 November 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BADAN ANGGARAN

Ketua,

Sekretaris

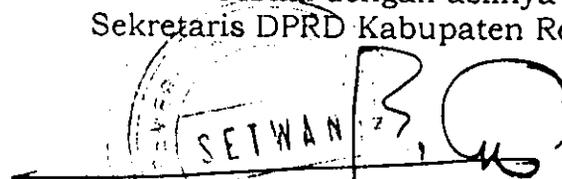
Ttd

ttd

H. MAJID KAMIL.M.Z

Drs. ACHMAD MUALIF

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

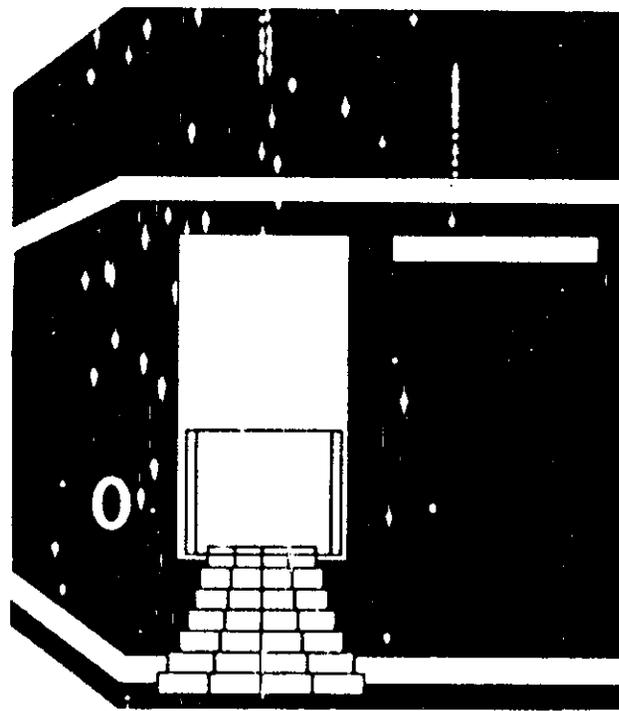
NIP. 19620804 198803 1 011

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**HASIL PEMBAHASAN RAPERDA APBD
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2015**



PPP

**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Rembang, 29 Nopember 2014
Dibacakan oleh : Zaimul Umam NS**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA APBD

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2015

Jum'at, 28 Nopember 2014

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM NS.

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, ashelatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

1. Sdr. Plt Bupati Rembang
- 2. Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang

- 3. Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- 4. sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang
- 5. Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf
- 6. Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW.

Sdr. Plt Bupati aan segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, dan juga kepada TAPD, yang telah bekerja keras, sehingga tahapan demi tahapan, pembahasan dan penyusunan RAPBD tahun 2015 ini, dapat selesai sesuai dengan jadwal, mulai dari KUA/PPAS, Pembahasan ditingkat komisi, Banggar, sampai dengan Finalisasi, walaupun sempat terjadi perdebatan yang cukup alot untuk mencapai kesepakatan .

Hal tersebut sebagai perwujudan bersama, dalam rangka menuju keberhasilan, Kemakmuran, dan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Selanjutnya dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, menyampaikan pendapat akhir , dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim Menyetujui, Rapeda APBD Tahun Anggaran 2015, untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2015, dengan segala perubahan, penambahan, pengurangan maupun pergeseran.

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti, antara lain :

1. Keberadaan operasinya Palabuhan Sluke perlu adanya pengawasan dan Pengamanan, ada isu telah terjadi transaksi Narkoba, hal tersebut sangat membayakan masyarakat Rembang.

2. Untuk mobil Damkar perlu ditempatkan Pos di daerah, misalkan Rembang Timur, Tengah atau Barat, untuk mempercepat pelayanan/pertolongan agar tidak terlambat.
3. Untuk menghadapi musim penghujan dan kemungkinan muncul adanya bahaya Banjir ataupun Tanah longsor, mohon agar dinas terkait melakukan kesiap siagaan.
4. Pada pelaksanaan pekerjaan jalan Beton, harus sekalian dengan pekerjaan bahu jalannya, agar tidak membahayakan pengguna jalan/pengendara.
5. Juga pada pelaksanaan saluran drainase tepi jalan raya, top pasangan lebih tinggi dari pada permukaan jalan, sehingga drainase tidak berfungsi, akibatnya jalan cepat rusak, mohon agar dinas terkait selalu melakukan pengawasan dan arahan teknis.
6. Perlu adanya evaluasi dan koreksi untuk data Gakin/keluarga kurang mampu, agar penerimaan kartu pintar, kartu sehat dan kartu keluarga sejahtera, tepat sasaran dan tidak timbul kecemburuan antar masyarakat di desa.
7. Minta segera ada pengisian kekosongan jabatan di SKPD, agar pelaksanaan pelayan masyarakat bisa lebih prima dan cepat.
8. Mohon agar Pelaksanaan Perda APBD Tahun Anggaran 2015 ini, dapat dilaksanakan sesuai rencana, dan selalu dilakukan Pengawasan secara Kontinew, serta diharapkan adanya Silpa yang seminimal mungkin.

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang hasil Pembahasan Raperda APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2015, untuk dijadikan Perda APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2015.

Trima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wassalamu a'laikum Warohmatulla'hi Wabarokaatuh.....

Rembang, 28 Nopember 2015

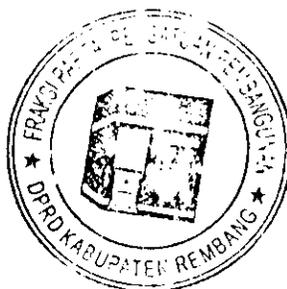
PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

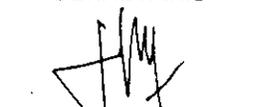
KABUPATEN REMBANG

KETUA

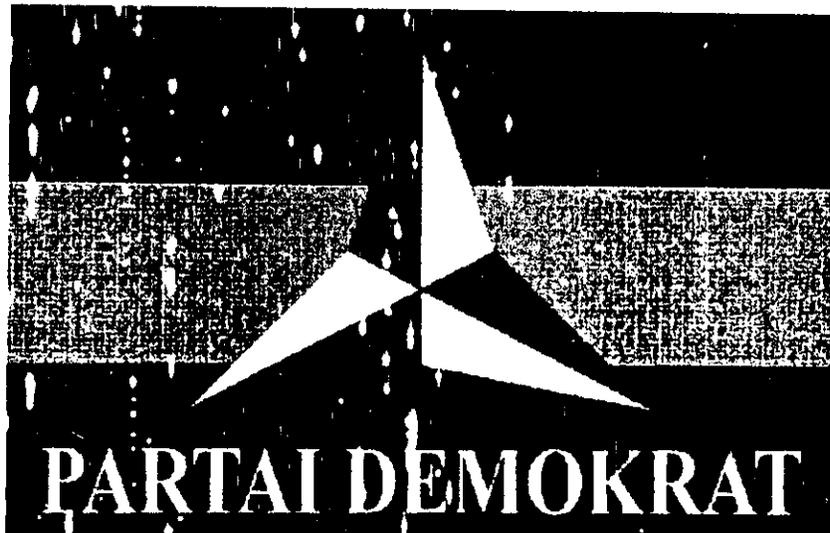

SUGIHARTO



SEKRETARIS


ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

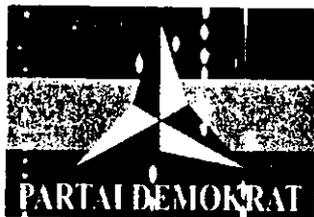


FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang, 28 November 2014

Dibacakan oleh : Hj.HIKMAH PURNAMAWATI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH II
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015
JUM'AT, 28 NOVEMBER 2014
DI BACAKAN OLEH : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang kami hormati :

1. Saudara Plt.Bupati;
2. Saudara Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf;
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbanagia.

Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua masih diberi kesehatan, keselarnatan lahir batin sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 menjadi Perda.

Syukur Alhamdulillah, tahapan demi tahapan pembahasan Raperda APBD 2015 mulai dari penyampaian, pembahasan di tingkat Komisi, Banggar sampai finalisasi dengan TAPD berjalan dengan baik dan lancar sehingga Raperda APBD 2015 bisa diselesaikan sesuai jadwal.

Saudara Plt.Bupati dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirohim kami dari Fraksi Demokrat menyetujui Rancangan Perda APBD Kabupaten Rembang TA.2015 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Kabupaten Rembang TA.2015.

Adapun beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan dan ditindak lanjuti adalah :

1. Kami mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang supaya di Anggaran Perubahan 2015 untuk ditambahkan anggaran pembebasan lahan Embung Kaliombo karena melihat harga tanah sekarang, anggaran 5 Milyar hanya mendapat kurang lebih 5 s/d 7 hektar.
2. Seiring bertambah padatnya proses bongkar muat di TPI Tasik Agung, dimohon kepada Dinas terkait supaya jalan dari sebelah barat Toko Air Mancur ke arah utara menuju TPI dapat dilebarkan.
3. Mohon kepada Dinas terkait supaya memasang *traffic light* di perempatan jalan dari sebelah barat Toko Air Mancur ke arah utara menuju TPI karena sering menyebabkan kemacetan, juga untuk menghindari kecelakaan lalu lintas.
4. Mohon agar potensi wisata yang ada di Kabupaten Rembang bisa dimaksimalkan sehingga masyarakat Rembang yang membutuhkan tempat wisata tidak harus pergi ke luar daerah dan bisa menarik wisatawan luar masuk berkunjung ke Rembang.
5. Dalam menghadapi persiapan pelaksanaan BLUD (Badan Layanan Unit Daerah) untuk Puskesmas, mohon Dinas Kesehatan agar menyeleksi terhadap Puskesmas yang benar-benar sudah siap baik sarana dan prasarana serta SDMnya.
6. Mohon kepada Dinas Pariwisata supaya mencari kegiatan-kegiatan yang spesifik demi kemajuan pariwisata di Rembang.
7. Dimohon kepada Pemerintah Daerah supaya secepatnya melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.RBSJ diupayakan selesai di akhir tahun ini.

Demikian pendapat akhir Fraksi Demokrat berkaitan dengan penetapan Rancangan Perda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 menjadi Perda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015. Semoga Allah SWT meridloi niat luhur kita semua.

Akhir kata bila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 28 November 2014

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA,


EDI KARTONO,SPd, MH

SEKRETARIS,


Hj.HIKMAH PURNAMAWATI



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RAPBD TAHUN 2015

disampaikan oleh Ilyas

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 28 November 2014

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas (Plt). Bupati Rembang

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkomida); Komandan Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri Rembang; dan Ketua Pengadilan Agama Rembang

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat di lingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sudar Sekretaris DPRD beserta jajarannya

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali pendapat akhir ini perkenankanlah kami menghaturkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT Atas segala limpahan rahmat Taufiq dan Hidayahnya sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-NYA. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW

Perkenankan FPKB mengucapkan selamat Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tanggal 28 November, pembangunan berkelanjutan untuk mewariskan hutan yang berfungsi baik bagi anak bangsa sebagai (1) Penyelamat lingkungan hidup dari ancaman banjir, tanah longsor, kekeringan dan perubahan iklim, (2) Penyedia kebutuhan hasil hutan kayu dan non kayu, sumber pangan, energi, obat-obatan, (3) Penyedia jasa lingkungan berupa air, oksigen, wisata alam, (4) Pelestari keanekaragaman hayati flora dan fauna, (5) Tempat pendidikan dan penelitian.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.....

Terima kasih kepada Saudara Pimpinan yang memberikan kesempatan kepada FPKB untuk menyampaikan pendapat akhir ini. Inilah pendapat akhir kami dalam penganggaran daerah sebagai anggota DPRD periode 2014-2019. Jika pendapat akhir ini baik insyaallah akan baik untuk selanjutnya.

Pendapat akhir FPKB terhadap RAPBD tahun 2015 , kami memberikan catatan atau pernyataan sebagai berikut :

1. Kegiatan pekerjaan infrastruktur khususnya pekerjaan jalan poros antar desa maupun antar kecamatan untuk ditingkatkan pengawasannya.
2. Pengawasan bidang pertambangan juga untuk di tingkatkan
3. Pemkab Rembang juga harus segera mensikapi polemic Pabrik semen Indonesia
4. Meminta kepada SKPD untuk merubah kebiasaan copy paste dalam program program yang diajukan dalam RAPBD, karena sering tumpang tindih.
5. Pengawasan kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan khususnya kurikulum 2013, serta memberikan perhatian pada bidang pendidikan seperti kelompok bermain, TK, Roudlotul atfal, madrasah diniyah dan.
6. Pemkab khususnya dinas pendidikan hendaknya mengalokasikan besisiwa bagi calon mahasiswa Rembang yang berprestasi.

7. Peningkatan apresiasi pada para atlet olah raga yang berprestasi di cabang masing-masing
8. Memberikan bantuan pembinaan pada organisasi kepemudaan yang berkomitmen pada kemaslahatan serta mempunyai dedikasi untuk bangsa dan negara mulai tingkat desa sampai kabupaten.
9. Pemkab untuk jg mengawasi keberadaan PJTKI atau lembaga yang akan memberangkatkan TKI/TKW agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
10. Pemkab untuk segera membuat perda tentang desa untuk menindak lanjuti undang-undang desa.
11. Pemkab untuk bisa memberikan perhatian khusus kepada para PKL alun alun dengan mengatur dan memberikan rasa adil kepada yang berjualan pagi/siang, dengan yang berjualan malam, sekaligus memeberikan peringatan kepada para PKL yang malam hari agar bisa menjaga kebersihan, kenyamanan pada para pengguna alun alun sebagai tempat berolah raga di saat pagi hari
12. Merekomendasikan kepada SKPD bahwa terkait dengan semua kegiatan yang akan di laksanakan yang kemudian tertuang dalam RKA seharusnya direncanakan dengan matang, agar pada saatnya pembahasan di tingkat komisi supaya tidak terjadi perubahan dan pergeseran secara signifikan.
13. Bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan UMKM dan ekonomi kerakyatan, hendaknya pemkab harus serius membina dan mendampingi petani guna mendapatkan semua proteksi harga agar bisa bertahan dan bersaing pada era pasar Bebas Asean
14. Berharap kepada pemkab supaya terus memantau dan antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan pupuk.
15. Meminta Pemkab untuk menertibkan pabrik dan pengolahan ikan agar memprhatikan dampak dari limbah supaya tidak mencemari lingkungan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.....

Sebelum menutup pendapat akhir ini, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim FPKB menerima RAPBD disahkan menadi APBD 2015.

Di akhir kata :

Jika hari ini seorang ulama yang mulia

Jika hari ini seorang perdana menteri berkuasa

Jika hari ini seorang raja menaiki tahta

Jika hari ini seorang presiden sebuah Negara

Jika hari ini seorang presiden sebuah Negara

Jika hari ini seorang penguam menang bicara

Jika hari ini seorang penulis terkemuka

Jika hari ini siapa saja menjadi dewasa

Sejarah nya adalah dimulai oleh seorang guru biasa yang dengan lembut penuh kasih sayang dan sabar mengajarkan tulis dan baca

Selamat hari guru.

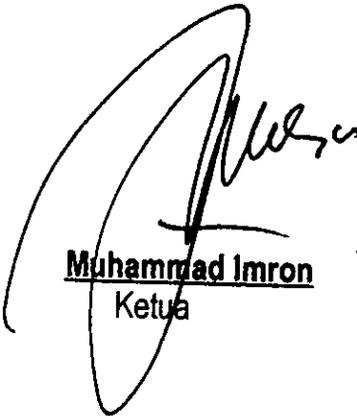
Sekian kurang lebih nya mohon maaf yang sebesar – besarnya .

Wallahul Muwaffiq Illaa Aq wamittorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

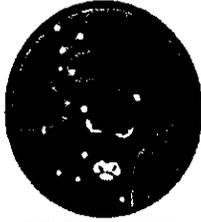
Rembang, 28 november 2014

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa


Muhammad Imron
Ketua




Ilyas
Sekretaris



PDI PERJUANGAN



PARTAI NasDem

FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 REMBANG

PENDAPAT AKHIR FRAKSI

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2015

Dibacakan Oleh : **WIDODO, SH.**

***Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
MERDEKA.....!!!***

Yang terhormat, Plt Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD
Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Rembang

Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag
dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat
se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan hidup. Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan berbagai berkah sehingga di pagi ini kami mampu menghadirkan Pendapat Akhir Fraksi PDIP NASDEM terkait RAPERDA APBD Kabupaten Rembang T.A 2015.

Setelah dilakukan pembahasan terkait Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2015, maka perkenankanlah di forum yang terhormat ini kami menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian, yang kami rekomendasikan untuk menjadi perhatian Pemkab Rembang juga hal - hal berikut ini :

1. Untuk bidang pertanian kami mengharapkan pada masa - masa mendatang Pemerintah Kabupaten Rembang memprioritaskan penambahan pembangunan dan normalisasi embung... besar... maupun kecil, irigasi - irigasi pertanian untuk menambah penampungan air hujan sehingga dapat mencukupi cadangan air untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya.
2. Untuk bidang kesehatan, yang menjadi perhatian kami adalah terbatasnya sarana dan prasarana puskesmas. Kami mohon ada peningkatan/penambahan sarana dan prasarana puskesmas supaya pasien yang perlu penanganan cepat tidak perlu harus menunggu di rujuk ke Rumah Sakit. Sehingga Puskesmas sebagai sentra pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan dapat terwujud.
3. Guna mendukung program pemerintah pusat tentang Kartu Perlindungan Sosial, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat kami meminta Saudara Plt. Bupati Rembang agar segera memerintahkan setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait untuk segera melakukan pendataan ulang supaya program pembagian dimaksud dapat tepat sasaran. Kami melihat dalam pembagian yang telah dilakukan kurang tepat sasaran.
4. Kami meminta kepada Saudara Plt. Bupati Rembang agar segera melakukan langkah-langkah yang serius, jika perlu dilakukan inspeksi dan/atau pemeriksaan atas kinerja manajemen, posisi kas, posisi aset dan para pihak yang harus bertanggung jawab serta kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan atas ambruknya manajemen PD. Apotik Rembang demi menjaga eksistensi dan citra nama baik Pemerintah Kabupaten Rembang.

5. Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang agar dilakukan advokasi dan perhatian atas 15 pemilik dan anak buah kapal yang menjadi korban aksi penyanderaan yang berujung pada pemerasan oleh nelayan di luar wilayah Rembang.

Kedepan kami meminta dilakukan sosialisasi yang menyeluruh atas wilayah-wilayah yang diperbolehkan dan wilayah-wilayah yang dilarang dilakukan penangkapan ikan di seluruh wilayah NKRI.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan banyak terima kasih.

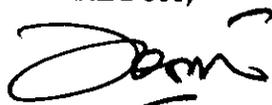
Selanjutnya dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2015 ini dapat diresmikan menjadi Perda.

FRAKSI

PDI PERJUANGAN NASDEM

DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,



JASMANI



SEKRETARIS,



MLI IRCHAM, ST.

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015**



REMBANG, 28 NOVEMBER 2014

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015

Disampaikan oleh H. Chasanudin
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Jum'at 28 November 2014

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.

Yang terhormat Sdr. Plt. Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkuangan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali kalimat pembuka, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Ke 3 dengan agenda

Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun 2015 dengan baik dan lancar, semoga apa yang telah kita kerjakan ini menjadikan amal dan ibadah yang bermanfaat.

Selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rosulullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Pada Pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun 2015, Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Pada Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terdapat pada pos anggaran di 3 SKPD yaitu : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi. Hal ini akan memicu permasalahan ditingkat lapangan karena ada rasa iri-irinan didalam pemeliharaan dan memungkinkan adanya tumpang tindih dalam penganggaran. untuk itu kami berharap, kedepan penggaran Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum difokuskan didalam 1 SKPD saja.
2. Dalam hal menjalankan amanah Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014, kami berharap pemerintah sudah menyiapkan semua regulasi agar bisa berjalan dengan lancar. termasuk tata cara pencairan Dana Desa yang mensyaratkan adanya dokumen APBDes, dimana dasar dari Dokumen APBDes ini adalah RPJMDes.

untuk itu pemerintah harus segera melakukan fasilitasi untuk terbentuknya dokumen tersebut.

3. Ketersediaan air Bersih maupun air irigasi di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun semakin berkurang, hal ini harus segera diantisipasi oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah pembuatan embung-embung di setiap daerah. Selain itu kami berharap Pemerintah daerah Kabupaten Rembang mengembangkan sumur resapan diberbagai wilayah agar bisa menjadi sumber air cadangan yang ada didalam tanah. Selain itu dengan adanya sumur resapan ini akan bisa mengurangi terjadinya banjir, karena air hujan tidak langsung mengalir ke sungai atau laut tetapi akan bisa tertampung didalam tanah.
4. Terkait dengan etos kerja Pemerintah Daerah, kami mengharapkan adanya peningkatan etos kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Budaya ini akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Rembang secara cepat, *Capacity Building* harus diterapkan dimasing-masing SKPD, sehingga Inovasi, Improfisasi didalam membangun Kabupaten Rembang bisa lebih maju sesuai dengan harapan masyarakat Rembang.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Demikian Pendapat akhir fraksi Gerindra, Dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, kami menerima Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun 2015 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Kabupaten Rembang tahun 2015. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta

membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 28 Nopember 2014

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG


HERI KURNIAWAN, SE. PUJI SANTOSO, SP. MH.
Ketua Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PENDAPAT
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap
Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2015

Disampaikan dalam Rapat Panpurna DPRD Kabupaten Rembang
Hari Jumat tgl. 28 Nopember 2014
Juru Bicara : Gatot Paeran, SH, MSi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Plt. Bupati Rembang .
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Region Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Samoai saat ini Tuhan Yang Maha Kuasa telah melimpahkan kesehatan, keselamatan serta kebahagiaan kepada kita semua. Karena itu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat-NYA seraya mohon agar kita selalu diberi keimanan dan kekuatan agar kedepan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Rembang. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan Selamat Hari Guru ke-69 yang jatuh pada tanggal 25 Nopember yang lalu dan Hari Ulang Tahun KORPRI yang ke-43 pada tanggal 29 Nopember hari ini. Semoga pengabdian dan pelayanannya bermanfaat bagi seluruh bangsa dan negara.

Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ibarat aliran darah dalam tubuh manusia, ia menentukan kuat lemahnya seseorang, menentukan sehat sakitnya manusia, menentukan keseimbangan jiwa dan raga seseorang, bahkan menentukan hidup matinya manusia; sedang Pemerintah Daerah bersama DPRD ibarat jantung yang mengolah dan

memompakan darah keseluruh tubuh. Maka bila terjadi gangguan dalam peredaran darah, seseorang akan sakit dan tidak bisa beraktivitas. Disinilah letak pentingnya sinergitas antara Pemda dengan DPRD.

Setelah melalui pembahasan maraton antara komisi-komisi DPRD bersama SKPD, sampailah saatnya Fraksi Karya Sejahtera menyampaikan pendapat terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dan beberapa hal yang dihadapi Kabupaten Rembang di tahun 2015 mendatang, sbb:

1. Kepada SKPD yang target PAD-nya meningkat, hendaknya sungguh-sungguh bekerja dan menghindari kebocoran agar target PAD benar-benar tercapai.
2. Fraksi Karya Sejahtera melihat terjadi tumpang tindih penganggaran antara satu SKPD dengan SKPD yang lain, masih menonjol ego-sektoral antar SKPD. Kami menghimbau agar hal ini tidak terjadi lagi dimasa mendatang.
3. Fraksi Karya Sejahtera merasakan ada SKPD yang mengambil kebijakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, berarati tidak memahami tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
4. Fraksi Karya Sejahtera melihat dalam melaksanakan tugas pelayanan SKPD masih bersifat normatif, belum menyentuh substansi dan kualitas serta tidak inovatif.
5. Dalam APBD Kabupaten Rembang tahun 2015 ini lebih dari separo untuk belanja pegawai, ini berarti APBD Kab Rembang tidak memihak kepada rakyat.
6. Fraksi Karya Sejahtera melihat anggaran perjalanan dinas (dalam dan luar daerah), biaya makan minum maupun belanja ATK yang terlalu berlebihan. Untuk itu kami menghimbau agar berhemat dan menghindari pemborosan.
7. Mengantisipasi pelaksanaan Undang-undang Desa, Fraksi Karya Sejahtera mengharap agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera

- mempersiapkan perangkat peraturan dan pengawasan agar kedepan pembangunan di desa lebih berkualitas dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
8. Melihat kondisi beberapa Kantor Kecamatan yang ada saat ini, FKS mengharap pada tahun anggaran yang akan datang, Pemkab Rembang merencanakan pembangunan kantor kecamatan yang representatif agar masyarakat mendapatkan pelayanan prima.
 9. Dengan berakhirnya masa kerja jabatan Direktur PDAM, FKS merekomendasikan kepada Pemerintah Kab Rembang segera mengadakan rekrutmen Direktur PDAM, agar PDAM Rembang bisa bekerja secara optimal.
 10. Dalam memberikan jawaban atas pertanyaan FKS tentang pengelolaan pendapatan Pelabuhan Tanjung Bonang pada rapat paripurna tanggal 12 Nopember yang lalu, Saudara Plt. Bupati menyampaikan bahwa pendapatan Tanjung Bonang selama ini masuk ke Kas Negara. Jawaban ini bertolak belakang dengan penjelasan PT Pelabuhan Rembang Kencana (PT PRK) selaku pengelola Pelabuhan Tanjung Bonang (pada saat rapat dengan Komisi B) bahwa penghasilan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Bonang sebesar Rp 22 milyar dikembalikan sebagai biaya reklamasi Pelabuhan Tanjung Bonang. Atas hal ini, Fraksi Karya Sejahtera melinat terjadi "mis-koordinasi", dan hal ini bisa menimbulkan kecurigaan yang tidak diinginkan. Fraksi Karya Sejahtera merekomendasikan agar Saudara Plt. Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan mengkoordinasikan dengan baik semua SKPD dan BUMD yang ada.

Dengan disertai catatan-catatan tersebut, Fraksi Karya Sejahtera dengan ini *menyetujui* ditetapkannya RAPERDA APBD menjadi PERDA APBD Kabupaten Rembang Tahun 2015.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum turun dari mimbar ini, kami ingin menyampaikan piweling ssb. "Punggawa kang seneng marang kawula iku dadi senenge kawula sajroning praja, agawe kukuh sarta minangka tamenging praja", artinya "Pejabat yang mencintai rakyat akan disayangi rakyat dalam negara tsb. dan membuat kokohnya negara dan menjadi perisai negara". Maka sebagai pelayan masyarakat marilah kita benar-benar memperhatikan suara dan aspirasi masyarakat, jangan sampai menyakiti hati rakyat. Bila ada kata dan ungkapan yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Fraksi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah dan bimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang. Amien.

Rahayu ingkang sami pinanggih - Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

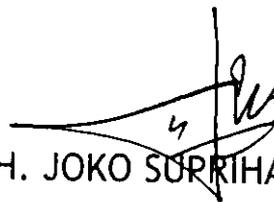
Ketua,



H. ISMARI, SH



Sekretaris,



H. JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT AKHIR
TERHADAP
RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Dibacakan Oleh : SUKARMAIN

Yang Terhormat,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Plt. Bupati Bupati Rembang,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang,
Camat se Kabupaten Rembang
Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Farpol, LSM Kab. Rembang dan hadirin yang
berbahagia

Assalaamu'alaikum Wt. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda ~~Perubahan APBD T. A 2014~~ dalam keadaan sehat.

2015

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,
Kami mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam pembahasan RAPBD T.A ~~2014~~²⁰¹⁵ Totalitas dalam setiap pembahasan sangat membantu dalam mengoptimalkan fungsi anggaran sebagai salah satu alat untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai ini.
Memperhatikan dinamika dalam setiap pembahasan, baik di tingkat komisi ataupun badan anggaran, maka Fraksi Harapan perlu memberikan catatan tentang beberapa hal :

1. Mengulang kembali pendapat kami pada pemandangan umum, kami mengharapkan untuk segera dapat mencarikan alternatif tempat untuk Kantor Satpol PP. Mengingat sampai saat ini status kantor tersebut masih pinjam pakai.
2. Fraksi Harapan memandang perlu untuk mengoptimalkan peran Badan Lingkungan Hidup sebagai bagian yang selalu terkait pada setiap pengambilan keputusan yang akan berdampak pada lingkungan, baik jangka pendek atau jangka panjang. Pembangunan infrastruktur ataupun penyusunan regulasi-regulasi daerah seyogyanya meletakkan isu lingkungan hidup sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Dikotomi antara isu lingkungan hidup dan pertumbuhan sudah tidak semestinya menjadi pemicu mandeknya semangat *go green* kita sebagai pengambil kebijakan. Untuk itu kami merekomendasikan untuk pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Lingkungan Hidup di beberapa wilayah dan dialokasikan anggaran operasional yang cukup serta pembelian alat-alat laboratorium yang memadai.
3. Pelabuhan Rembang Kencana adalah mimpi besar masyarakat Kabupaten Rembang. Pelabuhan ini kita harapkan bisa menjadi pintu masuk produk-produk dari luar daerah sekaligus sarana bagi pengusaha-pengusaha di Kabupaten Rembang dan sekitarnya untuk memasarkan produk-produknya. Pelabuhan Rembang Kencana diharapkan dapat menjadi *trigger* tumbuhnya perekonomian di Kabupaten Rembang. Untuk itu kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih *concern* tentang legalitas, kepemilikan saham, model pengelolaan dan capaian redistribusi pada Pelabuhan Rembang Kencana. Kami mengharapkan pengelolaan Pelabuhan Rembang Kencana transparan dan *accountable*, mengingat pelabuhan ini adalah aset yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Kebijakan Pemerintah RI untuk mengalihkan subsidi BBM kepada dari sektor konsumtif kepada sektor-sektor produktif akan menambah alokasi belanja pembangunan infrastruktur daerah dan pengembangan industri. Kami mendorong pemerintah daerah untuk "jeinput bola" dengan menyiapkan program-program baik untuk pembangunan Jrigasi, Bendung Bendungan, Jalan, Pelabuhan Nelayan dan program pengembangan industri kecil. Program-program tersebut sangat dibutuhkan, terlebih pembangunan infrastruktur di sektor pertanian. Mengingat sebagian besar sawah kita masih termasuk kategori sawah tadah hujan.
5. Pemerintah akan segera menggulirkan bantuan-bantuan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, kami mendorong pemerintah untuk secara aktif berkoordinasi

dengan Biro Pusat Statistik sebagai lembaga yang berwenang menyusun nama-nama anggota masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut. Supaya bantuan tersebut betul-betul dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak saja dan tidak terjadi tumpang tindih dengan program-program yang lain.

6. Kami menyangkan masih ditemukannya program-program atau kegiatan yang serupa di beberapa SKPD. Sebagai contoh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana dialokasikan untuk Pelatihan Budidaya Kambing Modern sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pertanyaannya adalah apakah Budidaya Kambing Modern sudah sesuai dengan tupoksi dan keahlian BPMPKB. Bukankah kegiatan tersebut lebih tepat jika dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan. Kami mengharapkan pemerintah daerah lebih cermat dan fokus dalam penyusunan program-program kegiatannya. Serahkanlah kepada ahlinya, maka Insya Allah hasilnya akan lebih optimal.
7. RSUD "Dr. R Soerbasno" adalah salah satu *icon* yang cukup membanggakan. Sebagai salah satu lembaga yang menyadari kepentingan kesehatan masyarakat, kami mengharapkan Manajemen RSUD "Dr. R. Soerbasno" senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta transparan dan *accountable* dalam pengelolaannya,

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Kami mengajak pemerintah daerah, segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang dan masyarakat untuk bersama-sama peduli dan melihat fenomena meningkatnya penderita HIV AIDS dan korban kekerasan pada anak dan perempuan. Data yang kami peroleh dari Kelompok Dukungan Sebaya "Sasosno Suryo", bahwa kelompok tersebut sudah mendapangi 124 kasus HIV AIDS dengan angka kematian 75 kasus. Faktor penyebab tingginya tingkat kematian adalah faktor ekonomi dan minimnya akses layanan kesehatan yang ada.

Sementara data dari Polres Rembang juga menunjukkan kekerasan (baik fisik, penelantaran ekonomi dan seksual) masih sering kita jumpai di masyarakat. Untuk itu kami mendorong segenap pihak untuk menaruh perhatian lebih kepada persoalan persoalan ini. Pemerintah Daerah kami harapkan dapat menyiapkan langkah-langkah preventif, penanganan pasien HIV atau korban kekerasan dan yang tidak kalah penting

adalah membantu mereka untuk dapat kembali ke masyarakat dan memberikan peluang kerja atau usaha mandiri.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,
Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, semoga pelaksanaan APBD T.A 2015 dapat berjalan dengan baik dan kami menyetujui RAPBD T.A 2015 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 28 November 2014

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Ketua


M. NUR HASAN

Sekretaris




SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN PIt. BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA
PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2015
Rembang, 28 November 2014**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah ;
- Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan
Kabag. di Lingkungan Setda Kabupaten
Rembang ;
- Ykh. - Kepala Badan/ Dinas/ Kantor se Kab.
Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

Mengawali pertemuan kali ini perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya-lah kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka ***Penetapan Persetujuan Raperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah T.A. 2015***, dalam keadaan sehat wala'fiat tiada kurang suatu apa.

Selanjutnya, melalui forum terhormat ini, izinkantah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat, yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang ini.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, melalui forum terhormat ini pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2015 ini,

“Alhamdulillah”, dapat disetujui dalam waktu yang tepat sesuai dengan jadwal perencanaan, dengan disertai semangat kemitraan yang tinggi dan komitmen yang kuat antara pemerintah dan legislatif. Sehingga hal ini, semakin memperkuat harapan kami akan pentingnya konsistensi kita bersama, dimana DPRD sebagai mitra strategis akan senantiasa mengawal dan mengagendakan proses-proses perencanaan dan penganggaran secara sinkron antara jajaran eksekutif dan legislatif.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam RAPBD tahun anggaran 2015 ini, kita dihadapkan pada tantangan yang sedemikian besar, krisis perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian Indonesia secara makro. ketidakpastian perkembangan perekonomian dan keuangan secara menyeluruh dapat memberikan efek domino terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah. oleh karena itu, kita tetap mengikuti dan mewaspadaai agar langkah-langkah strategi kebijakan daerah dapat diantisipasi secara cepat, tepat dan terukur.

Oleh karena itu, marilah kita berusaha mengambil langkah-langkah strategis secara tepat, terarah dan konkrit serta menyesuaikan kondisi riil masyarakat kita. Penting artinya, ini harus kita lakukan dengan optimalisasi penerimaan sumber daya serta ketepatan dalam pendistribusian belanja daerah untuk memberikan ruang gerak dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja, berpengaruh terhadap tahapan penyusunan anggaran, dengan pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil kinerja serta dapat diukur capaian targetnya, dengan tetap mengedepankan transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas berprinsip pada efisiensi, efektifitas, tepat guna dan tepat daya, mampu mencerminkan pengelolaan keuangan dalam rangka memberikan fungsi pelayanan publik secara utuh.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan dicapai, disertai penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Hal ini merupakan implementasi dari fungsi perencanaan, koordinasi dan motivasi serta fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi kinerja pemerintah daerah sebagai bentuk manajemen koordinasi yang baik.

Untuk itu, kami sangat menghargai semangat kerja keras dan kerjasama yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif yang terjalin selama ini. Sehingga melalui APBD ini, akan tercermin kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Program anggaran berbasis kinerja sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih program kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diikuti dengan pengalokasian anggaran untuk masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan anggaran ini salah satunya adalah upaya untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Rembang menuju situasi dan kondisi yang lebih kondusif, dan lebih mandiri, yang pada akhirnya nanti mampu mendorong perwujudan Rembang yang lebih baik dimasa kini dan dimasa yang akan datang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dapat beriringan secara komprehensif dan terintegrasi menjadi satu kesatuan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, setelah melalui pembahasan yang dinamis baik pada tingkat komisi maupun Badan Anggaran, pada hari ini kita telah mencapai kesepakatan mengenai program dan kegiatan serta besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Anggaran pendapatan pada RAPBD Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 1.293.964.533.640,- (*Satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah*)

Selanjutnya untuk Anggaran Belanja RAPBD Tahun 2015, diperkirakan sebesar Rp.1.481.899.399.672,- (*Satu triliun empat ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*),

Sehingga terdapat defisit sebesar (Rp.187.934.866.032,-) (*Seratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah*),

yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp. 187.934.866.032,- (*Seratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah*), sehingga pada Rancangan APBD Tahun 2015 menjadi balance.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan Penetapan Raperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang, agar menjadi Kabupaten yang maju, sejahtera dan mandiri. *Amin, amin, ya Robbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Plt. Bupati Rembang

 **H. ABDUL HAFIDZ**